

KONFLIK DAN KOLABORASI: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa

Dr. Drs. Ismail, M.Si.



Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa

ISBN 978-602-

15,5 x 23 cm, viii + ... halaman

Penulis: Dr. Drs. Ismail, M.Si.

Penyunting: M Fathur Rohman, M.M

Desain Cover : Diro Creative

Cetakan I, Agustus 2019

Diterbitkan oleh



Media Nusa Creative

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang

E-mail : mnc.publishing.malang@gmail.com

Website : www.mncpublishing.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 112 dan 113 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT penulis sampaikan atas terbitnya buku ini yang telah lama penulis rencanakan dengan segala daya yang dapat diupayakan.

Dari penelusuran penulis di laman Perpustakaan, topik buku yang membahas **Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa**, masih amat terbatas. Hal ini menjadi ilham penulis untuk menghadirkan buku kecil ini. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, penulis seringkali berdiskusi dengan mahasiswa IPDN terkait topik yang dibahas. Dari sanalah ide buku ini dimulai.

Akhir kata, semoga buku ini menambah khazanah pengetahuan khususnya topik konflik dan kolaborasi untuk bangsa dan negara.

Penulis berharap buku ini bermanfaat bagi pembaca yang mendalami pengetahuan manajemen konflik dan kolaborasi. Selamat membaca.

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 KONSEPSI DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN	
KONFLIK DAN KOLABORASI/INTEGRASI.....	1
Pengertian Manajemen.....	1
Pengertian Konflik.....	4
Kolaborasi dan Integrasi.....	18
Tujuan Kolaborasi.....	19
Prinsip-Prinsip Kolaborasi.....	20
Manfaat Kolaborasi.....	20
Hambatan Kolaborasi.....	21
Apakah Masalah itu?.....	22
Menemukenali (Identifikasi) Masalah.....	23
BAB 2 SUMBER KONFLIK SOSIAL DAN KEMAJEMUKAN... 27	27
Sumber-Sumber Konflik.....	27
Kemajemukan Dalam Dinamika Sosial Budaya.....	28
1. Kemajemukan Horizontal.....	28
2. Kemajemukan Vertikal	29
BAB 3 KONFLIK IDEOLOGI, SUMBER KONFLIK GLOBAL... 47	47
Konflik Ideologi Pasca Perang Dingin.....	47
Konflik Perbedaan Kesenjangan Antarbangsa Dalam Distribusi Kesejahteraan.....	52
BAB 4 SUMBER KONFLIK YANG LAHIR DARI NEGARA... 54	54
Kebijakan Presiden Habibie Terhadap Konflik Aceh.....	56
Konflik Terbaru Papua.....	59
Sikap Presiden Jokowi Terhadap Konflik Papua.....	60
BAB 5 SUMBER KONFLIK AKIBAT TENDENSI	
PRIMORDIAL.....	62
Perseteruan Satu Darah.....	63
Isu SARA Perang Ambon.....	68
Sekelumit Konflik Agama Di Poso.....	73
BAB 6 SUMBER PENYEBAB KONFLIK..... 77	77
Keputusan Hukum Atau Keputusan Politik.....	77
Demoralisasi Sosial.....	82

BAB 7 STRATEGI NEGARA DALAM MENGELOLA	
KONFLIK	87
Penerapan Surveillance (pengawasan ketat).....	87
Pembangunan Sistem Administrasi Hierarkis.....	89
Resolusi Konflik dan Kekuatan Militer.....	90
Pengembangan Sistem Ideologi Yang Solid.....	91
BAB 9 PENDEKATAN HUKUM DALAM PENGATURAN	
DAN PENGENDALIAN KONFLIK	94
Penyelesaian Konflik.....	97
Pembasmian Mental Konflik.....	102
Pengendalian Konflik.....	103
BAB 10 UPAYA PEMULIHAN KONFLIK DALAM	
MASYARAKAT	105
Saling Menghormati.....	105
Berbagi Kekuasaan Sebagai Akomodasi Konflik.....	106
Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Jurdil.....	107
Politik Otonomi Daerah.....	108
Bantuan Intervensi Asing.....	110
Peran Juru Damai.....	111
BAB 11 PRAKARSA PENGEMBANGAN PERDAMAIAN	113
Pelucutan Senjata/ Demiliterisasi.....	114
Reformasi Konstitusi.....	115
Bantuan Ekonomi.....	116
Pengembangan Rasa Saling Percaya.....	117
Dukungan Internasional (Konsiliasi, Mediasi dan	
Arbitrase).....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR INDEX	123
BIODATA PENULIS	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : tawuran bentuk solusi konflik di masyarakat.....	7
<i>Gambar 2 Diagram Ishikawa (Tulang ikan).....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 3 Proses Konsiliasi</i>	<i>107</i>

BAB 1

KONSEPSI DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN KONFLIK DAN KOLABORASI/INTEGRASI

Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu pengetahuan / ilmu serta seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi.

Aktivitas tersebut bisa berupa pengorganisasian yang meliputi: Perencanaan - Penyusunan - Pengusahaan - dan Pengawasan dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi supaya tujuannya terealisasi. Contoh jika pada organisasi pemerintahan tujuannya adalah pemaksimalan layanan publik, dll.

Tentang definisi manajemen itu sendiri banyak pakar manajemen yang memberikan makna tersebut. Istilah manajemen berasal dari kata "*manage*". Artinya: aktivitas mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin.

Pengertian manajemen menurut Mary Parker F.: "adalah sebagai suatu seni, tiap tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain." George R. Terry mengatakan definisi Manajemen: " merupakan ilmu sekaligus seni, manajemen adalah wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya."

Adapun Koontz mengatakan Manajemen adalah: " suatu seni yang produktif yang didasarkan pada suatu pemahaman ilmu." Koontz menambahkan, ilmu dan seni tidaklah bertentangan, namun masing masing saling melengkapi. Melengkapi itu, Stoner berpendapat: "Ilmu Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan juga menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan."

Adapun Wilson mengatakan: "Manajemen adalah sebagai sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan sistematis." Oey Liang Lee memberi arti: "Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengendalian (pengawasan) dari sumber daya perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan."

Dan terakhir menurut Lawrence A Appley mengatakan: "Manajemen adalah sebuah seni dalam mencapai tujuan yang diinginkan yang dilakukan dengan usaha orang yang lain."

Manfaat yang Bisa Diperoleh dari Manajemen

Manajemen seolah menjadi hal yang wajib untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah organisasi. Manfaat yang didapatkan dengan menerapkan ilmu manajemen yang baik diantaranya berikut¹:

1. Organisasi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki.
2. Manajemen akan memudahkan setiap individu maupun kelompok dalam organisasi untuk menyajikan dan menjalankan seluruh kerangka kerja yang efektif.
3. Mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif
4. Kerangka kerja dalam jangka waktu yang panjang bahkan yang pendek disusun secara detail dan bisa dijalankan dengan mudah

¹ <https://nichonotes.blogspot.com/2015/02/pengertian-manajemen.html>

5. Menumbuhkan sikap profesional disetiap individu pada organisasi dengan memberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
6. Merancang strategi untuk mencapai tujuan secara efektif, rasional, sistematis dan bisa dijalankan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terhubung.

Proses Fungsi Manajemen: Bagaimana Manajemen Bisa Berjalan?

Menurut teori yang umum dijadikan acuan, ada 4 fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POAC (Planning - Organizing - Actuating - Controlling) yang dibutuhkan dan dijalankan dalam kegiatan manajemen.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut dan merancang aktivitas kerja organisasi tersebut.

Perencanaan bisa diartikan upaya dalam mengantisipasi adanya kecenderungan di masa mendatang dan penentuan sebuah strategi yang tepat agar bisa merealisasikan tujuan organisasi.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses yang meliputi bagaimana strategi yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada sebuah struktur organisasi yang tangguh, sesuai, dan lingkungan yang kondusif.

Pengorganisasian bisa memberikan kepastian bahwa pihak pihak yang berada dalam organisasi bisa bekerja bersama sama dengan efektif dan efisien.

3. Fungsi Pengarahan

Pengarahan adalah tahap dimana program diimplementasikan supaya bisa dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi.

Pengarahannya sebuah upaya dalam memotivasi pihak-pihak tersebut agar bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh dan tingkat produktifitas yang sangat tinggi.

4. Fungsi Pengendalian

Pengendalian adalah upaya untuk memastikan semua kegiatan yang dijalankan bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan tahap dan target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa perubahan-perubahan minor yang bisa terjadi didalam lingkungan yang dihadapi.

Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Definisi Konflik, Faktor, Ragam, Dampak dan Solusi

1. Pengertian Konflik Menurut Para Ahli :

Menurut Nardjana (1994) mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.³

Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Wijono,1993, p.4)

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn (1998:580) yang dimaksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah:

“Conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience some emotional antagonism with one another.” Yang kurang lebih memiliki arti bahwa konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.

Menurut Stoner konflik organisasi adalah mencakup

³ <https://duniapendidikan.co.id/konflik/>

ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau peselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. (Wahyudi, 2006:17)

Sementara itu Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai: Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.

Keadaan atau perilaku yang bertentangan (Pickering, 2001).

Jadi, kita dapat mendefinisikan konflik (conflict) sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama.

Definisi ini mencakup beragam konflik yang orang alami dalam organisasi-ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya. Selain itu, definisi lain cukup fleksibel untuk mencakup beragam tingkatan konflik-dari tindakan terang-terangan dan keras sampai ke bentuk-bentuk ketidaksepakatan yang tidak terlihat.

Menurut Berstein (1965), konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif (+) dan ada pula yang negatif (—) di dalam interaksi manusia.

Menurut Dr. Robert M.Z. Lawang, konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik, tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.



Gambar 1: tawuran bentuk solusi konflik di masyarakat

Menurut Ariyono Suyono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.

Menurut James W. Vander Zanden, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka.

2. Faktor Penyebab Konflik :

Beberapa faktor berikut merupakan penyebab konflik:

1). Perbedaan Setiap Individu

Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan dan pendapat serta cara berinteraksi. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang menjadi penyebab konflik.

2). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kebudayaan masing-masing daerah juga memiliki keunikan tersendiri serta dapat membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, perilaku atau cara berbicara orang Batak yang keras seringkali dianggap arogan serta suka marah oleh orang lain yang berbeda kebudayaan, misalnya orang Sunda dll.

3). Faktor Kepentingan

Setiap individu ataupun kelompok di suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan di setiap masing-masing. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi dan sosial maupun politik.

Perbedaan pandangan serta kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia juga faktor penyebab konflik yang sangat sulit untuk dihindari.

4). Interaksi Sosial

Kurangnya keharmonisan di dalam hal interaksi sosial juga bisa menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial bisa disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya sifat bawaan seseorang, kondisi ekonomi, kesenjangan sosial, kurang pendidikan, serta lain sebagainya.

5). Perubahan Sosial

Perubahan sosial juga dapat terjadi secara alami oleh seseorang karena pada dasarnya manusia memang senantiasa mengalami perubahan. Dan hal ini juga cukup sering menjadi faktor penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat.

Konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Manusia

- Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya

kepemimpinannya.

- Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku.
- Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter.

Faktor Organisasi

- Persaingan dalam menggunakan sumberdaya.
- Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi.
- Interdependensi tugas.

Perbedaan nilai dan persepsi.

Kekaburan yurisdiksional, konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas. Contohnya potensi konflik terjadi karena suatu unit/departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit/departemen yang lain menganggap hal itu sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hirarki organisasi.

Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi, baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit/departemen.

3. Jenis-jenis konflik

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

- a. konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan- peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
- b. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).

- d. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini.

1. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contohnya, konflik Ambon, Poso, Kupang, dan Sambas.

Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari perbedaan pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Contohnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal.

Konflik vertikal merupakan konflik antarkomponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi antarorganisasi massa.

Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilannya alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya, konflik Aceh. Walau demikian peranan campur tangan pihak asing juga tak kalah penting dalam kasus Aceh.

Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia

Dalam Masyarakat Konflik dibedakan menjadi konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan konflik ideologi.

1. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial! Dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dan pimpinan negara. Contohnya, kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti (12 Mei 1998).
3. Konflik sosial horizontal (SARA), yaitu konflik yang terjadi antaretnis, suku, golongan, atau antarkelompok masyarakat. Contohnya, konflik yang terjadi di Ambon.
4. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya, konflik yang terjadi antarpengikut suatu parpol.
5. Konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah, konflik antarpengusaha ketika melakukan tender, dsb.
6. Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya, adanya perbedaan pendapat

antarkelompok dalam menafsirkan RUU antipornografi dan pornoaksi.

7. Konflik ideologi merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, konflik yang terjadi pada saat G-30-S/PKI.

Berdasarkan Cara Pengelolaannya

Berdasarkan cara pengelolaannya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik interindividu, konflik antarindividu, dan konflik antarkelompok sosial.

Konflik interindividu merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik dapat muncul dari dua penyebab, yaitu karena kelebihan beban (*role overloads*) atau karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranan (*person-role incompatibilities*). Dalam kondisi pertama seseorang mendapat beban berlebihan akibat status/kedudukan yang dimiliki, sedang dalam kondisi yang kedua seseorang memang tidak memiliki kesesuaian yang cukup untuk melaksanakan peranan sesuai dengan statusnya. Perspektif konflik interindividu mencakup tiga macam situasi alternatif berikut.

- Konflik pendekatan-pendekatan, seseorang harus memilih di antara dua buah alternatif behavior yang sama-sama atraktif.
- Konflik menghindari-menghindar, seseorang dipaksa untuk memilih antara tujuan-tujuan yang sama-sama tidak atraktif dan tidak diinginkan.
- Konflik pendekatan-menghindari multipet, seseorang menghadapi kemungkinan pilihan kombinasi multipel; dari konflik pendekatan-menghindari.

Konflik antar individu merupakan konflik yang terjadi

antara seseorang dengan satu orang atau lebih, sifatnya kadang-kadang substantif, menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional, menyangkut perbedaan selera, dan perasaan like/dislike (suka/tidak suka). Setiap orang pernah mengalami situasi konflik semacam ini, ia banyak mewarnai tipe-tipe konflik kelompok maupun konflik organisasi. Karena konflik tipe ini berbentuk konfrontasi dengan seseorang atau lebih, maka konflik antarindividu ini juga merupakan target yang perlu dikelola secara baik.

Konflik antarkelompok merupakan konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial, karena mereka hidup dalam kelompok-kelompok. Contohnya, konflik antarkampung.

4. Ciri-Ciri dan Tahapan Konflik

Menurut Wijono (1993 : 37) Ciri-ciri Konflik adalah :

- a. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat suatu interaksi saling bertentangan sehingga timbul pertentangan dalam mencapai tujuan.
- b. Munculnya interaksi ditandai gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan.
- c. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan.

Tahap perkembangan ke arah terjadinya konflik sebagai berikut:

- a. Konflik masih tersembunyi (*laten*)
- b. Konflik yang mendahului (*antecedent condition*)
- c. Konflik yang dapat diamati (*perceived conflicts*) dan konflik yang dapat dirasakan (*felt conflict*)
- d. Konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku (*manifest behavior*).

Penyelesaian atau tekanan konflik

Akibat yang muncul apabila konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. (Wijono, 1993, 38-41).

5. Dampak Konflik

Menurut Wijono (1993:3), bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak positif akan muncul. Namun bila, dalam pengelolaannya ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik akibatnya muncul dampak negatif konflik (Wijono, 1993, p.2).

Konflik dapat berdampak positif dan negatif yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Dampak Positif

- a. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
- b. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif.
- c. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif dan kreativitas.
- d. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stress bahkan produktivitas kerja semakin meningkat.
- e. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan

pendidikan (education), pelatihan (training) dan konseling (counseling) dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Semua ini bisa menjadikan tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja meningkat akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin.

- Dampak Negatif

- a. Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam kerja
- b. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab.
- c. Seringnya terjadi perselisihan antar karyawan sehingga sulit untuk konsentrasi dan muncul perasaan kurang aman serta merasa tertolak oleh teman ataupun atasan karena tidak dihargai hasil pekerjaannya.
- d. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi, dengan cara merusak mesin- mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain.
- e. Meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut labor turn-over. Sehingga menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi.

6. Akibat Konflik

Konflik dapat berakibat negatif maupun positif tergantung pada cara mengelola konflik tersebut.

Akibat negatif:

- Menghambat komunikasi.
- Mengganggu kohesi (keeratan hubungan).
- Mengganggu kerjasama atau "team work".
- Mengganggu proses produksi, bahkan dapat

menurunkan produksi.

- Menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan.
- Individu atau personil mengalamikan tekanan (stress), mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustrasi, dan apatisme.

Akibat Positif:

- Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis.
- Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- Melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi.
- Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif.
- Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat.

7. Tujuan Manajemen Konflik

Saat muncul sebuah konflik, dan konflik tersebut bisa dimanajemen, akan terlihat beberapa tujuan manajemen konflik (Wirawan, 2010:132)

- a. Menfokuskan anggota pada visi, misi dan tujuan organisasi.

Saat dalam suatu organisasi terdapat manajemen konflik, secara tidak langsung konflik tersebut akan mempengaruhi kinerja dari masing-masing anggotanya, yang pada akhirnya mengarah pada visi, misi, dan tujuan organisasi

- b. Memahami orang lain dan memahami keberagaman.

Bahwa saat melakukan pekerjaan. akan ada saatnya muncul bantuan dari pihak-pihak lain. Saat kita berusaha memahami orang lain yang dalam hal ini telah membantu kita. dan kita menemukan perbedaan antara diri dan orang tersebut. manajemen konflik digunakan

untuk memahami keberagaman yang ada

c. Meningkatkan kreativitas.

Dalam usaha manajemen konflik. akan muncul berbagai upaya untuk mengurangi konflik. Upaya tersebut memunculkan kreativitas dan bahkan inovasi. yang selanjutnya akan berpengaruh kepada produktivitas.

d. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan.

Dalam pemecahan konflik. akan selalu dihadapkan kepada sebuah pertimbangan. Manajemen konflik yang ada memfasilitasi terciptanya alternatif, yang pada akhirnya membantu menentukan keputusan yang bijak dalam sebuah pertimbangan.

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

Reran serta, pemahaman bersama. dan kerja sama adalah salah satu kunci yang bisa dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Seluruh unit-unit yang ada saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu.

f. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik.

Organisasi dalam perjalanannya akan selalu menemui konflik yang harus dihadapi. Konflik yang ada sebelumnya menjadi pembelajaran bagi sebuah organisasi untuk kedepannya menciptakan prosedur untuk menyelesaikan konflik berikutnya.

8. Cara Pengendalian Konflik dan Kekerasan

Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekan sebuah konflik agar tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat

a. Pengendalian secara Umum

Secara umum, terdapat beberapa cara dalam upaya

mengendalikan atau meredakan sebuah konflik, yaitu sebagai berikut.

1) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan melalui lembaga- lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Contoh bentuk pengendalian konflik seperti ini adalah melalui lembaga perwakilan rakyat.

2) Arbitrasi

Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

3) Mediasi

Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Namun berbeda dengan arbitrasi, keputusan-keputusan pihak ketiga tidak mengikat pihak manapun.

4) Ajudication

Ajudikasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui pengadilan.

Kolaborasi dan Integrasi

Berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia sudah seharusnya dipelihara dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. NKRI dibangun oleh roh kemajemukan / pluralitas yang merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihapus oleh apapun. Kita menerima pluralitas. Dalam kitab suci disampaikan agar kita saling mengenal antar bangsa dan Tuhan menyukai orang-orang yang paling baik diantara mereka dalam

melakukan perbaikan. Untuk itu sangat penting melakukan kolaborasi dan integrasi.

Kolaborasi (kerja sama) atau pemecahan masalah. bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasan bagi pihak- pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari, dan memecahkan masalah hingga setiap individu/kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya.

Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan secara antropologis.

Myron Weiner berpendapat, integrasi bangsa adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Terkait ini Dr. Nazaruddin Sjamsuddin mengatakan, pengertian Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Adapun menurut J. Soedjati Djiwandono, arti kata Integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri.

Pengertian Integrasi Nasional secara Politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional.

Pengertian Integrasi Nasional secara Antropologis adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keseresaian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Kolaborasi

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk membawa individu, lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis memecahkan masalah yang ada dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh satu kelompok saja. Kolaborasi harus fokus pada peningkatan, komunikasi kapasitas dan efisiensi sekaligus meningkatkan hasil.

Prinsip-Prinsip Kolaborasi

1. Mulailah dengan tujuan yang mempersatukan.
2. Menciptakan, memelihara dan melihat kembali Misi dan pernyataan Visi. Visi merupakan gambaran masa depan dan harus ditulis dalam konteks masa sekarang. Misi menjelaskan tujuan dari kerjasama – ini adalah alasan mendasar untuk keberadaan kolaborasi itu.
3. Tetapkan tujuan dan sasaran yang terukur.
4. Tetapkan harapan yang tinggi – mengharapkan yang terbaik dari orang-orang yang dengannya Anda bekerja.
5. Sebagai kelompok, identifikasi pemimpin untuk kolaborasi yang berpikiran terbuka, bersedia untuk berbagi kepemimpinan dan memberdayakan orang lain.
6. Menunjukkan rasa hormat bagi anggota kolaborasi (mempertimbangkan waktu orang, transportasi, kebutuhan perawatan anak, akses dan kenyamanan, mengakui kontribusi orang lain, dan menjadi fleksibel.)
7. Mengembangkan komunikasi yang terbuka dan jujur
- ingatlah bahwa setiap orang perlu didengarkan.
8. Mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi upaya kolaborasi.
9. Bertahan dengan hal itu, bertahan dan saling mendukung!
10. Rayakan keberhasilan.

Manfaat Kolaborasi

Manfaat kolaborasi mungkin langsung atau jangka panjang, langsung atau tidak langsung. Penting untuk dicatat bahwa beberapa anggota kolaborasi mungkin akan mendapat keuntungan lebih dari yang lain. Manfaatnya meliputi:

- Peningkatan pengiriman pemrograman;
- Peluang bagi pengembangan profesional;
- Peningkatan komunikasi dan informasi yang disempurnakan;
- Peningkatan penggunaan program dan sumber daya yang tersedia dalam komunitas;
- Penghapusan duplikasi;
- Datang dalam berbagai bentuk, ukuran dan durasi yang bervariasi – satu ukuran tidak cocok untuk semua;
- Peningkatan ketersediaan sumber daya,
- Peningkatan citra publik.
- Permasalahan sarana dan mentalitas;
- Kurangnya staf atau waktu untuk berpartisipasi dalam kolaborasi;
- Benturan dengan fokus dan prioritas organisasi antara kolaborasi dan anggotanya;
- Ketidakpercayaan dari organisasi lain;
- Memperlambat pengambilan keputusan;
- Terbatasnya sumber daya atau kurangnya keinginan untuk berbagi sumber daya yang ada;
- Posisi pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari anggota koalisi individu;
- Penarikan dukungan sebagai akibat dari tekanan luar dari individu atau kelompok;
- Penurunan tingkat kerjasama antar kolaborator selama krisis.

Hambatan Kolaborasi

- Permasalahan sarana dan mentalitas;

- Kurangnya staf atau waktu untuk berpartisipasi dalam kolaborasi;
- Benturan dengan fokus dan prioritas organisasi antara kolaborasi dan anggotanya;
- Ketidakpercayaan dari organisasi lain;
- Memperlambat pengambilan keputusan;
- Terbatasnya sumber daya atau kurangnya keinginan untuk berbagi sumber daya yang ada;
- Posisi pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari anggota koalisi individu;
- Penarikan dukungan sebagai akibat dari tekanan luar dari individu atau kelompok;
- Penurunan tingkat kerjasama antar kolaborator selama krisis.

Apakah Masalah itu?

Saat kita ditanya, apa itu masalah banyak diantara kita yang sejenak berfikir merumuskan kata-kata yang tepat. Padahal, masalah adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, tak ada seorangpun yang tak luput dari masalah baik masalah yang sifatnya ringan ataupun masalah yang sifatnya berat.

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik.

Diantara definisi/ pengertian masalah menurut beberapa ahli dan kamus Bahasa Indonesia:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan.

- James Stoner mengatakan: masalah adalah suatu situasi menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan.
- Menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan.
- Roger Kaufman: masalah adalah suatu kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang diharapkan.
- Dorothy Craig: masalah adalah situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diinginkan.
- Masalah adalah suatu kesenjangan antara kondisi ideal (harapan) dengan kondisi aktual (eksisting, saat ini).

Saat anda dihadapkan dengan pilihan mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan diklat kepemimpinan pola baru inipun termasuk sebuah masalah dan anda telah membuat sebuah keputusan untuk siap mengikutinya. Kebutuhan pada sebuah pencapaian optimal bisa diatasi dengan inovasi yang hasilnya Anda harapkan dapat membuat perubahan di unit kerja Anda. Untuk itu langkah awal yang harus Anda tempuh adalah menemukenali masalah.

Menemukenali (Identifikasi) Masalah

Saat kita berusaha mengenali masalah, jangan mempertimbangkan hal-hal yang hanya persoalan sekunder. Cukuplah apa masalah yang Anda hadapi sebenarnya. Anda bisa mempertimbangkan persoalan lainnya nanti.

Identifikasi masalah bertujuan agar kita mendapatkan sejumlah masalah yang nantinya akan diselesaikan atau dicari cara penyelesaiannya.

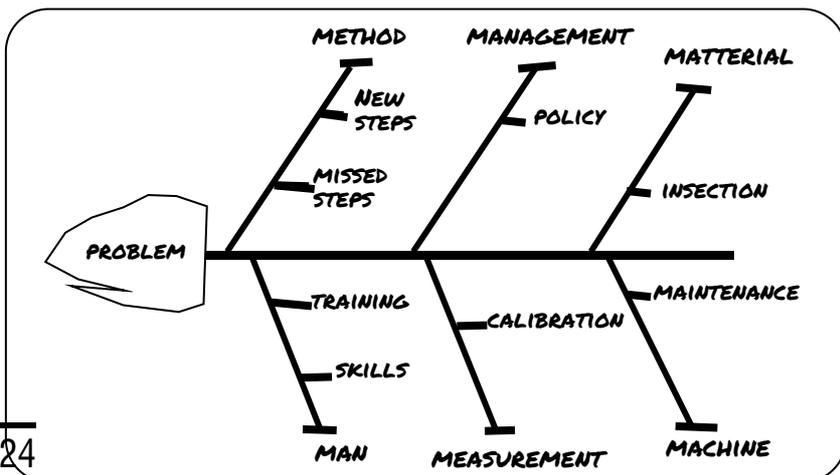
Salah satu alat analisis untuk menemukenali peta

permasalahan adalah diagram Ishikawa. Ini adalah salah satu teknik dalam mengambil keputusan dengan mengenali akar permasalahan. Diagram Ishikawa sering juga disebut sebagai diagram “sebab-akibat” atau diagram “tulang ikan”. Diagram ini adalah sebuah alat grafis yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menampilkan pendapat tentang komponen inti suatu kondisi di dalam organisasi. Diagram ini juga dapat menyusuri sumber-sumber penyebab atas suatu masalah.

Adalah Kaoru Ishikawa orang yang pertama kali mengenalkan diagram ini, seorang penemu alat-alat permesinan di tahun 1960-an. Teknik Ishikawa ini masih banyak digunakan oleh para pengambil keputusan hingga hari ini karena sederhana dan praktisnya.

Fungsi utama dari diagram Ishikawa adalah untuk mendapatkan beberapa sumber kunci yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap masalah yang sedang diperiksa. Sumber-sumber ini kemudian dipilih untuk proses perbaikan. Diagram ini juga menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi satu dengan lainnya.

Gambar di bawah adalah model diagram Ishikawa yang sederhana.



Gambar 2 Diagram Ishikawa (Tulang ikan)

Seperti diinformasikan di awal, diagram ini sering juga disebut dengan beberapa nama seperti diagram Ishikawa, diagram Cause-and-Effect, diagram Fishbone, dan Root Cause Analysis. Konsep ini memberikan acuan penyebab utama (tulang besar) yang bersumber dari “5M”, yaitu:

- *Manpower- sumber daya manusia*
- *Methods- metode, prosedur kerja*
- *Materials-bahan, software*
- *Machines-peralatan, hardware*
- *Money- dana, anggaran.*

Walau dalam pengembangannya, kita bebas melakukan modifikasi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Barulah dari penyebab utama tadi kita pecah lagi menjadi poin-poin spesifik (tulang kecil).

Kuncinya adalah mendapatkan 3–6 kategori utama yang mencakup hal-hal yang berpengaruh paling besar. Seorang pemimpin yang ingin mendapatkan informasi dan ide-ide tambahan, umumnya mereka melakukan *brainstorming* bersama tim yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

Ide-ide besar diletakkan di “tulang besar” sedangkan ide spesifik diletakkan pada “tulang kecil”. Semakin detail sebuah ide melihat sebuah permasalahan maka akan semakin baik. Kedalaman maksimum “tulang” ini biasanya berkisar empat sampai lima tingkat. Ketika gambar sudah lengkap dengan merujuk pada semua kemungkinan, proses penggambaran diagram ini bisa dianggap selesai.

BAB 2

SUMBER KONFLIK SOSIAL DAN KEMAJEMUKAN

Sumber-Sumber Konflik

- a. Sumber konflik yang terjadi karena adanya faktor komunikasi (*communication factors*) meliputi :
- 1) Salah pengertian, salah memahami atau salah dalam persepsi yang berkenaan dengan kalimat yang disampaikan,
 - 2) Bahasa yang sulit dimengerti,
 - 3) Informasi yang mendua dan tidak lengkap, Gaya individu manajer yang tidak konsisten
 - 4) Faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (*job structure or organization structure*)

Sumber konflik yang terjadi karena adanya faktor komunikasi meliputi :

- 1) Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan,
 - 2) Persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas,
 - 3) Saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan
- b. Faktor yang bersifat personal. (*personal factors*)
- 1) Ketidaksihesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka,
 - 2) Perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi

c. Faktor lingkungan (*environmental factors*)

Kemajemukan Dalam Dinamika Sosial Budaya

Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk (plural society) pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik.⁴

Konsep masyarakat majemuk Furnivall di atas, dipertanyakan validitasnya sekarang ini sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Pelly (1989) mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal.

1. Kemajemukan Horizontal

Secara horizontal, masyarakat majemuk, dikelompokkan berdasarkan:

- Etnis dan ras atau asal usul keturunan. Terdapat banyak perhimpunan ataupun organisasi kekeluargaan yang menyatukan masyarakat majemuk berdasarkan etnis tertentu, asal usul keturunan, dan ras nya.
- Bahasa daerah. Boleh jadi suatu komunitas masyarakat majemuk terbentuk atas kesamaan bahasa daerah.
- Adat Istiadat atau perilaku. Komunitas yang terbentuk atas kesamaan adat istiadat daerah.
- Agama. Komunitas yang terbentuk atas kesamaan

⁴ <https://drsuprobo.wordpress.com/2013/01/16/kemajemukan-dalam-dinamika-sosial-budaya-horizontal-dan-vertikal/>

keyakinan iman dan agama yang sama.

- Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Komunitas yang terbentuk atas kesamaan pada pakaian, atau makanan atau budaya materialis yang lain.

2. Kemajemukan Vertikal

Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan:

- Penghasilan atau ekonomi.
- Pendidikan.
- Pemukiman.
- Pekerjaan.
- Kedudukan sosial politik.

Keragaman atau kemajemukan, masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnik, agama, pekerjaan (profesi), penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Pada bagian ini akan diulas tentang kemajemukan masyarakat Indonesia karena unsur-unsur ras dan etnik.

Ras

Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu *razza*. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis.

Berdasarkan karakter biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri

utama pembeda antarras antara lain ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Misalnya, ras Melayu secara umum bercirikan sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan berperawakan badan sedang. Ras negro bercirikan kulit hitam dan berambut keriting.

Ciri-ciri yang menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau somatik. Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik, seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Pembedaan seperti itu hanya mewakili faktor tampilan luar.

Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas tiga kelompok, yaitu kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Sedangkan Koentjaraningrat (1990) membagi ras di dunia ini dalam 10 kelompok, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, Polynesia, Melanesia, Micronesia, Ainu, Dravida, dan Bushmen.

Etnik atau suku bangsa

Koentjaraningrat (1990) menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi, yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

F. Baart (1988) menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Bila merujuk pendapat F. Baart di atas, identitas kesukubangsaan antara lain dapat dilihat dari unsur-unsur suku bangsa bawaan (*ethnic traits*). Ciri-ciri tersebut meliputi natalitas (kelahiran) atau hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan kepercayaan (religi), kesamaan mitologi, dan kesamaan totemisme.

Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Berapa persis jumlah etnik di Indonesia sukar ditentukan. Sebuah buku pintar Rangkuman Pengetahuan Sosial Lengkap menuliskan jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia ada 400 buah (Sugeng HR, 2006). Klasifikasi dari suku bangsa di Indonesia biasanya didasarkan sistem lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven mengemukakan adanya 19 lingkaran hukum adat di Indonesia (Koentjaraningrat, 1990). Keanekaragaman kelompok etnik ini dengan sendirinya memunculkan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Jadi, berdasarkan klasifikasi etnik secara nasional, bangsa Indonesia adalah heterogen.

Konsep Kemajemukan/Pluralitas

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik, yaitu (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat

Indonesia pada masa Hindia Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang digunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, demikianlah menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik (JS Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press, 1967, halaman 446-469).

Catatan penulis:

*Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Sehingga, masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal. Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat plural, di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (subkultur) berbeda satu dengan yang lain. Sebuah masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA (sukubangsa, agama, ras, atau pun aliran/golongan-golongan) yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut. Heterogen lawan dari kondisi yang disebut homogen. Disebut homogen kalau anggota masyarakat berasal dari SARA yang secara relatif sama. Disebut heterogen kalau berasal dari SARA yang saling berbeda, namun –sekali lagi– mereka tidak mengelompok (tersegmentasi) berdasarkan SARA tersebut (Budiono Kusumohamidjoyo (2004), dalam *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT Grasindo, hal 45).*

Sebagai suatu masyarakat majemuk, Furnivall menyebut Indonesia ketika itu sebagai suatu tipe masyarakat tropis di

mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas merupakan penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi yang menjadi golongan kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan keturunan Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang keturunan Timur Asing lainnya, menempati kedudukan di antara kedua golongan tersebut.

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*); masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang organis.

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja saja, mereka tidak menetap di Indonesia. Kehidupannya semata-mata adalah di sekitar pekerjaannya saja. Mereka memandang masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya di Indonesia, tidak sebagai warga masyarakat, apalagi warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Banyak memang di antara mereka yang tinggal di Indonesia sampai kira-kira 20 tahun, tetapi kemudian lebih suka menghabiskan hari tuanya di negeri Belanda.

Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, sama dengan orang-orang Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Kehidupan orang-orang pribumi pun demikian juga, kehidupan mereka semata-mata adalah kehidupan pelayan di negerinya sendiri.

Tiga golongan masyarakat ini merupakan masyarakat kasta yang masing-masing mempertahankan atau memelihara

cara berfikir, berperasaan, dan bertindak golongannya, hasilnya adalah tidak adanya kehendak bersama sebagai suatu masyarakat yang utuh atau organis.

Demikianlah gambaran masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda sebagaimana digambarkan oleh Furnivall. Keadaannya pada masa kini sudah tentu berbeda dari pada masa tersebut. Namun demikian, mengikuti beberapa modifikasi atas pengertian masyarakat majemuk yang dicetuskan setelah generasi Furnivall, konsep masyarakat majemuk tetap dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial masyarakat Indonesia.

Dengan mengabaikan perwujudannya yang kongkrit di masa kini, esensi dari konsepsi Furnivall tentang masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu terhadap yang lain.

Tegasnya, suatu masyarakat disebut majemuk apabila masyarakat tersebut secara struktural memiliki beberapa subkebudayaan yang bersifat *diverse*. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta oleh sering tumbuhnya konflik-konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Sehubungan dengan keadaan yang demikian, Clifford Geertz menjelaskan

bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subsistem-subsistem yang masing-masing terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk, sebagai berikut.

1. terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain,
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer,
3. kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
4. secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,
5. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, serta
6. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Pluralitas Indonesia sesudah Masa Revolusi

Konsep pluralitas/kemajemukan yang dibuat oleh Furnivall sangat tepat digunakan untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, di mana terdapat tiga golongan yang saling berbeda, yaitu orang-orang kulit putih, keturunan Tionghoa, dan pribumi.

Lalu, bagaimana apabila digunakan setelah masa revolusi 1945?

Sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, golongan Eropa yang sebelumnya menempati

kedudukan penting, terlempar keluar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Maka sejak saat itu, pluralitas yang ada adalah pluralitas internal yang terdapat di antara golongan-golongan pribumi, dan memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnivall.

Konfigurasi Etnis Masyarakat Majemuk

Dalam makalah yang disampaikan pada seminar Pluralitas, Kesenjangan Sosial, dan Integrasi Nasional di Surabaya tanggal 23 Juli 1990, Dr. Nasikun menyatakan bahwa berdasarkan konfigurasinya, masyarakat majemuk dapat dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, (2) masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, (3) masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, dan (4) masyarakat majemuk dengan fragmentasi.

Kategori pertama merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik yang kurang lebih seimbang, sehingga untuk mencapai integrasi sosial atau pemerintahan yang stabil diperlukan koalisi lintas-etnis.

Kategori kedua dan ketiga merupakan varian-varian masyarakat majemuk yang memiliki konfigurasi etnik yang tidak seimbang, di mana salah satu kelompok etnik tertentu (kelompok mayoritas pada kategori kedua dan kelompok minoritas pada kategori ketiga) memiliki *competitive advantage* yang strategis di hadapan kelompok-kelompok yang lain.

Masyarakat majemuk dengan kategori keempat (dengan fragmentasi) meliputi masyarakat-masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnik, semuanya dengan jumlah anggota yang kecil dan tidak satupun memiliki posisi politik yang dominan dalam masyarakat. Kehidupan politik dalam masyarakat dengan konfigurasi demikian sangatlah labil,

karena ketidakmampuan membangun *coalition building* yang diperlukan untuk mengakomodasi konflik-konflik yang pada umumnya bersifat anarkhis sebagai akibat dari kecurigaan etnik dan hadirnya pemerintahan yang otoriterian.

Sebab-sebab pluralitas

Mengapa kita menjadi majemuk? Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi.

Yang pertama, keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih tiga ribu pulau yang terserak di sepanjang equator kurang lebih tiga ribu mil dari timur ke barat, dan seribu mil dari utara selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas sukubangsa di Indonesia.

Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira dua ribu tahun sebelum masehi, keadaan geografik serupa itu telah memaksa mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Isolasi geografik demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan-kesatuan sukubangsa yang lain. Setiap kesatuan sukubangsa terdiri atas sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil, satuan-satuan sosial itu mengembangkan dan akhirnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih dari itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan

yang seringkali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih kurang tiga ratus sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda.

Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan adat istiadat yang tidak sama. Lebih dari sekedar menyebutkan banyaknya sukubangsa di Indonesia, Skinner menggambarkan juga perbandingan besarnya sukubangsa-sukubangsa tersebut. Beberapa sukubangsa yang paling besar sebagaimana disebut oleh Skinner adalah Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. Kemudian ada beberapa sukubangsa yang lain yang cukup besar, yaitu Bali, Batak Toba, dan Sumbawa.

Buku Statistik Hindia Belanda menggambarkan persentase sukubangsa di Indonesia pada tahun 1930, sebagai berikut:

Jawa : 47,02 persen, Sunda : 14,53 persen, Madura : 7,28 persen, Minangkabau : 3,36 persen, Bugis : 2,59 persen, Batak : 2,04 persen, Bali : 1,88 persen, Betawi: 1,66 persen, Melayu: 1,61 persen, Banjar : 1,52 persen, Aceh: 1,41 persen, Palembang: 1,30 persen, Sasak: 1,12 persen, Dayak: 1,10 persen, Makasar: 1,09 persen, Toraja: 0,94 persen, lainnya : 9,54 persen.

Walaupun angka tersebut dibuat pada waktu yang telah sangat lampau, tetapi melihat angka kelahiran, angka kematian, atau angka pertumbuhan penduduk, mungkin hal tersebut masih dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini.

Mengikuti pengertian sukubangsa yang dikemukakan oleh para ahli antropologi, Dr. Nasikun menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu sukubangsa di Indonesia, dan

berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, dan berdasarkan perkiraan tambahan penduduk golongan Tionghoa 3 persen, serta dengan mengingat kurang lebih 100.000 orang Tionghoa kembali ke Tiongkok selama tahun 1959 dan 1960, diperkirakan jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia pada tahun 1961 sebanyak 2,45 juta orang, sementara penduduk pribumi waktu itu diperkirakan 90.882 juta orang. Walaupun jumlah orang Tionghoa sangat kecil dibandingkan dengan penduduk pribumi, tetapi mengingat kedudukan mereka yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, mereka sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan sukubangsa-sukubangsa yang lain (yang secara keseluruhan disebut pribumi).

Faktor kedua yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.

Telah sejak lama masyarakat Indonesia memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia adalah agama Hindu dan Budha dari India sejak kurang lebih empat ratus tahun sebelum masehi.

Hinduisme dan Budhisme pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup dan berkembang lebih dulu. Namun, pengaruh Hindu dan Budha terutama dirasakan di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang luas pada abad ke-15.

Pengaruh Islam sangat kuat terutama pada daerah-daerah di mana Hindu dan Budha tidak tertanam cukup kuat. Karena keadaan yang demikian, cara beragama yang sinkretik sangat terasa, kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke-17 dan terutama akhir abad ke-19 ternyata tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih tetap merupakan daerah agama Hindu.

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan Bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku, suatu jenis barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu.

Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis ke luar dari daerah-daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katholik pun segera digantikan pula oleh pengaruh agama Kristen Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama apabila dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Kristen Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu.

Hasil final dari semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya

golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah yang strategis di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah pedalaman-pedalaman, dan golongan Kristen (Katholik dan Protestan) di daerah-daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindu Bali (Hindu Dharma) terutama di Bali.

Di Pulau Jawa dijumpai golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan Kristen yang tersebar di hampir setiap daerah perkotaan Jawa.

Faktor ketiga, iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara, telah mengakibatkan pluralitas regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda, yakni daerah pertanian basah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah ladang (*shifting cultivation*) yang banyak dijumpai di luar Jawa.

Struktur Masyarakat Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional

Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan-persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal maupun vertikal pada tingkat nasional.

Apabila mengikuti pandangan para penganut teori fungsionalisme-struktural, sistem sosial senantiasa terintegrasi

di atas landasan dua hal, yaitu: (1) konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental, dan (2) anggota-anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliation*), sehingga tumbuh *cross-cutting loyalties*, loyalitas yang silang-menyilang dari para anggota masyarakat terhadap kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial di mana mereka menjadi anggotanya.

Ketika hal ini diterapkan di suatu masyarakat majemuk akan berhadapan dengan rendahnya kemampuan elemen-elemen dalam masyarakat majemuk membangun konsensus tentang nilai-nilai dasar sebagaimana dikemukakan oleh van den Berghe. Segmentasi ke dalam bentuk satuan-satuan sosial yang masing-masing terikat oleh ikatan-ikatan yang sifatnya primordial, mudah sekali menimbulkan konflik-konflik yang terjadi baik pada tingkat ideologis maupun politis.

Pada tingkat ideologis, konflik tersebut terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh (serta menjadi ideologi) satuan-satuan sosial. Pada tingkat politik, konflik-konflik di antara elemen-elemen dalam masyarakat majemuk terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Dalam situasi konflik, sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara mengokohkan solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya dengan cara mengokohkan solidaritas ke dalam, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama: mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Mengikuti pandangan Parsons, kelangsungan hidup masyarakat Indonesia tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati bersama oleh sebagian

besar orang-orang Indonesia, akan tetapi lebih dari itu, nilai-nilai umum tersebut harus pula dihayati benar melalui proses sosialisasi dan internalisasi.

Pada derajat tertentu, pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu, dan berbahasa satu, yang tumbuh sebagai hasil gerakan nasionalisme pada permulaan abad ke-20 yang berjiwa anti-kolonialisme itu, merupakan konsensus nasional yang memiliki daya tiada terkira di dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai pada saat ini.

Pandangan para penganut pendekatan konflik, bahwa masyarakat majemuk dapat terintegrasi di atas paksaan (*coercion*) dari suatu kelompok-kelompok atau kesatuan sosial yang dominan, memperoleh kebenaran paling tidak pada masyarakat Indonesia di zaman kolonial, di mana terdapat sejumlah kecil orang-orang kulit putih dengan kekuasaan politik, militer, dan ekonominya yang mampu menguasai sejumlah besar orang yang terpisah-pisah secara etnis, ekonomi, politik, ideologis, maupun budaya ke dalam satuan-satuan sosial yang banyak sekali jumlahnya.

Konsensus atau paksaan?

Mengikuti pemikiran R. William Lidle, konsensus nasional merupakan prasyarat bagi tumbuhnya integrasi nasional, karena integrasi nasional yang tangguh hanya dapat berkembang apabila: (1) sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya, dan (2) sebagian besar warga masyarakat sepakat tentang struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah teritorial tersebut.

Dengan kata lain, integrasi nasional hanya dapat tumbuh di atas konsensus mengenai batas-batas suatu masyarakat

politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut; yang pertama: kesadaran sebagai warga sebuah bangsa dan yang kedua konsensus mengenai bagaimana suatu kehidupan bangsa diselenggarakan, termasuk sistem nilai yang mendasari hubungan-hubungan sosial di antara para anggota suatu bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau ideologi negara dalam tataran yang sangat umum dapat dinyatakan sebagai kesepakatan nasional tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Kemudian, perundang-undangan yang lahir dari sistem politik yang ada, dapat dikatakan sebagai kesepakatan mengenai bagaimana kehidupan bangsa ini diselenggarakan.

Walaupun demikian, seperti berulang disampaikan, pembahasan tentang bagaimana masyarakat majemuk terintegrasi dalam tingkat nasional tidak dapat dilihat dari sudut pandang teori struktural fungsional. Sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagi timbulnya konflik-konflik sosial yang sedikit banyak bersifat *vicious circle*, dan yang oleh karenanya mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial di atas landasan *coercion*.

Bentuk struktur sosial dan integrasi nasional

Sesudah revolusi kemerdekaan, konflik di antara golongan-golongan di dalam masyarakat Indonesia berubah menjadi tidak bersifat eksklusif lagi. Perbedaan sukubangsa, yang pada masa penjajahan lebih merupakan perbedaan ras, tidak lagi jatuh berhimpitan dengan perbedaan-perbedaan agama, daerah, dan pelapisan sosial. Perbedaan antara sukubangsa Jawa dan luar Jawa tidaklah dengan sendirinya merupakan perbedaan antara golongan Islam Santri, golongan Abangan, dan golongan Kristen. Mereka yang berasal dari sukubangsa-sukubangsa berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota dari suatu golongan agama yang sama,

demikian juga sebaliknya. Struktur demikian, menurut Peter M. Blau disebut struktur sosial yang mengalami interseksi (*intersection social structure*), yang fungsinya positif atau mendukung terciptanya integrasi sosial. Berbeda dengan struktur sosial yang berhimpitan yang disebut *consolidated social structure* (struktur sosial terkonsolidasi) yang menghambat terciptanya integrasi sosial.

Catatan penulis:

Secara sosiologis, terdapat dua pendekatan untuk menjawab persoalan integrasi sosial/nasional dalam masyarakat majemuk, yaitu (1) ada tidaknya konsensus yang lebih menekankan pada dimensi budaya (teori struktural fungsional), dan (2) ada-tidaknya ketergantungan di antara kelompok-kelompok yang ada, atau ada-tidaknya kelompok dominan. Pandangan yang kedua ini lebih menekankan dimensi struktural (teori struktural konflik).

Menurut pendekatan konsensus (teori struktural fungsional) integrasi dapat dicapai melalui suatu kesepakatan tentang nilai dasar, atau semacam common platform di antara kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial yang ada; sedangkan menurut pendekatan konflik, integrasi hanya dapat dicapai melalui dominasi satu kelompok atas lainnya, atau adanya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok yang ada.

Terciptanya integrasi sosial/nasional dalam masyarakat majemuk dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) struktur sosialnya, apakah mengalami interseksi atau konsolidasi, (2) faham atau ideologi, yang berkembang dalam masyarakat apakah ethnosentrisme, primordialisme, aliran, sektarianisme, dan lain-lain, ataukah faham relativisme kebudayaan, (3) apakah dapat berlangsung koalisi lintas-etnis/kelompok, (4) apakah dapat membangun konsensus tentang nilai dasar, (5) apakah berlangsung proses-proses

menuju akulturasi budaya majemuk, (6) adakah dalam masyarakat tersebut kelompok dominan, atau (7) apakah di antara kelompok-kelompok yang ada terdapat saling ketergantungan, terutama di bidang ekonomi.

Struktur sosial yang bersifat *intersected*, berkembangnya faham relativisme kebudayaan, koalisi lintas-etnis, konsensus tentang nilai dasar, akulturasi budaya majemuk, dan adanya kelompok dominan merupakan faktor-faktor yang mendorong berlangsungnya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk.

<https://agsasman3yk.wordpress.com/2011/04/06/struktur-majemuk-masyarakat-indonesia/>

BAB 3

KONFLIK IDEOLOGI, SUMBER KONFLIK GLOBAL

Konflik Ideologi Pasca Perang Dingin

Era Perang Dingin yang kental dengan pertarungan ideologi antara liberalisme-kapitalisme dengan sosialisme-komunisme berakhir dengan ditandai beberapa peristiwa geopolitik yang sekilas dilihat merupakan awalan dari sebuah era baru. Salah satu peristiwa geopolitik penting yang menandai berakhirnya Perang Dingin ialah keruntuhan Tembok Berlin pada 1989, yang kemudian disusul reunifikasi Jerman pada tahun 1990 (Goldstein, 2005)⁵. Peristiwa penting lainnya yang juga turut menandai akhir Perang Dingin ialah keruntuhan Uni Soviet beserta paham komunis di Eropa Timur (Crockatt, 2001⁶).⁷

Kedua peristiwa tersebut jika sekilas dilihat menandai bahwa kini pertarungan yang bersifat bipolar tak lagi relevan di pasca Perang Dingin. Bahkan menurut Cox (2001)⁸, pasca Perang Dingin adalah sebuah era kemenangan kapitalisme. Keruntuhan Uni Soviet serta paham komunisme yang diusungnya membuat seluruh dunia pasca Perang Dingin menerima sistem kapitalisme yang disebarkan oleh Amerika Serikat.

Selain tidak relevannya pertarungan bersifat bipolar (dua

⁵ Goldstein, Joshua S., 2005. *International Relations*, Pearson/Longman

⁶ Crockatt, Richard, 2001. "The End of the Cold War", dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press

⁷ <https://berpijar.co/blog/2018/06/30/narasi-geopolitik-pasca-perang-dingin-pertarungan-identitas-dan-perdagangan-sebagai-pengganti-pertarungan-ideologi/>

⁸ Cox, Michael, 2001. "International History", dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press

kutub), terlihat pula bahwa dunia pasca Perang Dingin menjadi cenderung homogen. Tentu ini merupakan konsekuensi logis dari kekalahan blok sosialis-komunis, yang secara otomatis mengantarkan blok liberalisme-kapitalisme sebagai pemenang tunggal dari pertarungan ideologi di era Perang Dingin.

Perubahan karakteristik geopolitik pasca Perang Dingin dibanding era sebelumnya diamini oleh Francis Fukuyama (1989) dalam karyanya yang berjudul "*The End of History?*"⁹. Kemenangan ide-ide Barat adalah bukti utama bahwa tidak adanya penantang kuat bagi nilai-nilai liberalisme yang berasal dari dan disebarkan oleh Barat. Namun itu tidak semuanya benar. Masih ada nilai-nilai luhur yang mengendap-endap dalam melawan kapitalisme, yaitu yang berbasis keimanan dan adat bangsa-bangsa Timur.

Fukuyama (1989) juga menegaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin tidak hanya sekedar berlalunya suatu peristiwa khusus begitu saja, tetapi juga menjadi sebuah akhir sejarah, dimana hal tersebut merupakan titik akhir dari evolusi ideologi dan universalisasi demokrasi liberal ala Barat sebagai bentuk final dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Adanya universalisasi ideologi dan nilai-nilai Barat membuat penulis melihatnya sebagai upaya 'homogenisasi' dunia.

Ide-ide baru pasca Perang Dingin juga terlihat dari pemikiran Luttwak (1990). Dalam karyanya yang berjudul "*From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*"¹⁰. Luttwak berpendapat bahwa geo-ekonomi selalu menjadi aspek penting dalam kehidupan internasional. Pada masa lalu, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dibayangi oleh prioritas strategis dan modalitas

⁹ Fukuyama, F., 1989. "*The End of History?*", dalam *The National Interest*, No 16, Summer 1989.

¹⁰ Luttwak, E., 1990. "*From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*", dalam *The National Interest*

strategis.

Dari Konflik Ideologi Menuju Logika Ekonomi dan Politik Identitas?

Dari permukaan terlihat bahwa jika logika konflik mendikte kebutuhan akan kerja sama melawan musuh bersama, namun secara kontras justru sesungguhnya logika perdagangan yang mendikte persaingan. Seperti contoh, dibalik konfrontasi Barat-Soviet sebenarnya dalam internal kubu Barat sendiri terdapat sengketa perdagangan antara Eropa Barat dengan Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dengan Jepang. Namun kemudian sengketa tersebut segera diselesaikan sebelum kemudian menimbulkan dampak politik yang dapat mengganggu.

Namun Luttwak (1990) menambahkan, dengan berkurangnya ancaman militer dan aliansi militer, prioritas dan modalitas geoekonomi pun kini mendominasi aksi-aksi negara. Sehingga dapat dipahami bahwa persaingan antar berbagai negara pasca Perang Dingin tidak lagi didasari pada persaingan ideologi seperti Perang Dingin.

Apabila sebelumnya perubahan fundamental pada kajian geopolitik pasca Perang Dingin menurut Luttwak (1990) adalah pergeseran persaingan dari semula dilatari oleh ideologi menjadi motif ekonomi, maka perubahan fundamental yang terdapat pada pendapat Samuel P. Huntington (1993)¹¹. Menurut Huntington, sumber yang mendasari konflik dalam dunia tidak lagi secara primer oleh ideologi ataupun ekonomi. Manusia yang terbagi-bagi ke dalam banyak identitas menyebabkan konflik akan lebih didominasi oleh masalah kultural.

Negara bangsa akan tetap menjadi aktor terkuat dalam

¹¹ Huntington, S., 1993. "The Clash of Civilizations?", dalam *Foreign Affairs* 72(3): 22-49

kontestasi dunia, tetapi prinsip-prinsip dasar dari konflik dalam perpolitikan global akan terjadi antara bangsa dan kelompok dari peradaban berbeda. Garis patah-patah yang memisahkan peradaban akan menjadi garis pertempuran di masa depan menurut Huntington.

Kerja sama negara-negara pasca Perang Dingin pun tidak lagi didasari pada ideologi seperti era sebelumnya, tetapi menurut Huntington (1993) didasari pada asas kekeluargaan atau *kin-country syndrome*. Kin-country syndrome merupakan kerja sama yang dilatari pada asas-asas kekeluargaan, dimana aliansi kerja sama negara-negara di dalamnya terhimpun dari negara-negara yang serumpun secara kultur.

Himpunan negara-negara yang secara kultur serumpun ini merupakan bentuk upaya dalam menghadapi negara-negara lain yang menantang mereka. Aliansi yang didasari kin-country syndrome juga ditujukan untuk meraih tujuan-tujuan politik dan ekonomi. Salah satu contoh aliansi kin-country syndrome, yang penulis tunjukkan ialah aliansi negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam SPF (South Pacific Forum) yang pada era 1980-an berhasil mengagalkan rencana Jepang untuk membuang limbah reaktor nuklir ke lautan Pasifik (Fiji Times, 1985 dalam Ogashiwa, 2002)¹².

Adapun menurut Susanne Peters (1999)¹³, geopolitik pasca Perang Dingin bergeser dari semula pertarungan 'West' vs 'East', yang merujuk pada Amerika Serikat melawan Uni Soviet, menjadi 'West' vs 'Rest'. Pergeseran tersebut kemudian yang memunculkan diskursus baru terkait keamanan. Diskursus baru tersebut terkait adanya dugaan terkait hubungan tak terpisahkan antara keamanan negara-negara Barat dan

¹² Ogashiwa, Yoko, 2002, "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge

¹³ Peters, S., 1999, "The 'West' against the 'Rest': Geopolitics after the end of the cold war", dalam *Geopolitics* 4(3): 29-46

instabilitas yang terdapat di negara-negara Dunia Ketiga.

Dengan demikian hal tersebut yang kemudian melegitimasi negara-negara Barat untuk merancang geostrategi yang dimaksudkan untuk mengontrol negara-negara Dunia Ketiga secara politik dan ekonomi, apabila keduanya gagal, maka jika perlu lewat cara-cara militer. Geostrategi ini tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan ideologi, namun atas dasar kepentingan ekonomi.

Peters (1999) pun menyebut bahwa berbagai motif yang mendasari geostrategi negara-negara Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga ialah untuk melindungi peningkatan investasi beberapa negara Barat di wilayah negara-negara Dunia Ketiga, dan juga ketergantungan negara-negara Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga, khususnya negara-negara Timur Tengah, terkait cadangan minyak.

Ketika musuh ideologis telah mati, maka tak heran pembeda antara 'kita' dengan 'mereka' kini digantikan oleh politik identitas. Musuh Barat kini telah berganti, dari Uni Soviet dan negara-negara satelitnya menjadi orang-orang Arab dan Muslim, dalam upayanya 'mengatasi' krisis yang meluas dari Pakistan sampai Afrika Utara (Peters, 1999).

Namun apakah narasi-narasi baru di atas tersebut sepenuhnya benar dan dapat diterima? Rasanya terlalu naif juga jika kemudian mengiyakan sepenuhnya. Jika berbicara mengenai kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal yang ditulis oleh Fukuyama, rasanya saya tidak akan dapat menolak fakta bahwa banyak negara Barat sebagai pengusung utama perdagangan bebas sedang mengalami kelesuan ekonomi, terutama pasca Resesi Besar 2008, yang kemudian kini disusul dengan munculnya politisi-politisi ekstrem kanan populer di negara-negara Barat, yang dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat, salah satunya akibat kelesuan ekonomi.

Konflik horizontal yang dilatarbelakangi identitas memang marak ditemui, namun juga patut diingat bahwa penyebab konflik tidak pernah tunggal. Sehingga kemudian, apa yang dapat dipahami bahwa pertarungan identitas dan perdagangan memang merupakan narasi mayoritas, namun ia tidaklah bersifat mutlak menggambarkan narasi geopolitik hari ini. Namun kedepannya, pertarungan identitas sepertinya masih mendominasi narasi geopolitik kontemporer, mengingat pertarungan ideologi telah mati total.

Konflik Perbedaan Kesenjangan Antarbangsa Dalam Distribusi Kesejahteraan

Konflik antar bangsa

Konflik yang lahir dari motif kepentingan ekonomi dibungkus agar seolah-olah yang terjadi merupakan konflik antar-agama adalah agenda para penjajah. Sifat tamak dan ekspansif para penjajah dalam menguasai sumber daya alam suatu negara sudah maklum diketahui bangsa-bangsa Asia. Contoh terdekat adalah konflik Rohingya.

Ada konflik kepentingan ekonomi di balik persoalan Rohingya. Di situ ada jalur sumber energi, minyak dan gas. Kepentingan imperialis itu dibungkus dengan konflik agama dan dipelihara oleh militer Myanmar.¹⁴

Konflik antar-etnis di Myanmar sudah terjadi sejak masa penjajahan Inggris. Inggris, kata Daniel, memang menggunakan politik yang memecah belah etnis dan terus dipelihara sebagai sebuah peta konflik.

Kalau dari historis ini dimulai dari penjajahan Inggris yang membelah etnis. Seperti di Khasmir misalnya, sehingga

¹⁴ Kristian Erdianto, "Konflik Politik dan Ekonomi di Balik Tragedi Kemanusiaan Rohingya", <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/03/18404621/konflik-politik-dan-ekonomi-di-balik-tragedi-kemanusiaan-rohingya?page=all>.

mewarisi peta konflik di sana. Etnisnya pun berbeda-beda. Tragedi kemanusiaan terhadap warga Rohingya tidak bisa dilihat sebagai konflik antara pemeluk agama Budha dan warga Rohingya yang mayoritas memeluk Islam. Di dalam ajaran Budha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama itu terlibat dalam perang. Apalagi menimbulkan pembunuhan. Itu langsung dianggap melakukan dosa yang sangat besar.

Sementara itu, dikutip dari situs berita Deutsche Welle, kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) Siegfried O Wolf berpendapat, krisis yang dialami warga Rohingya lebih bersifat politis dan ekonomis. Siegfried menuturkan, komunitas warga Rakhine yang beragama merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksplorasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Di sisi lain etnis Rohingya dianggap sebagian warga Rakhine sebagai pesaing tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Selain itu, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak bisa memberikan suara bagi partai politik mereka. Faktor inilah yang menyebabkan bertambah runcingnya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam tersebut.

Faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan antar agama. Ini juga jadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya, serta pelanggaran hak-hak sosial-politis mereka. Siegfried memandang kekerasan terhadap warga Rohingya juga memiliki aspek ekonomi.

BAB 4

SUMBER KONFLIK YANG LAHIR DARI NEGARA

Peristiwa konflik memiliki dampak yang sangat buruk bagi kemajemukan masyarakat yang selama ini dipupuk dan dirawat bersama. Dampak buruk akan semakin terasa apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pembiaran sehingga dampak konflik sangat mungkin untuk semakin meluas. Masyarakat tentu tidak ingin pembiaran terhadap konflik kemudian berpotensi membuka luka-luka lama yang dulu pernah dialami saudara kita di Poso, Sampit, dan Maluku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital guna meredam atau bahkan meminimalisir bibit-bibit konflik, khususnya konflik horizontal yang pada umumnya mengatasnamakan etnis, golongan, maupun agama.

Peran pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, pemulihan pasca konflik, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik.

Mencegah Lebih Baik dari Mengobati

Upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik

horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul ke permukaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membatasi habis akar konflik.

Pemerintah daerah juga dalam hal ini harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif terhadap kasus konflik yang sedang terjadi dan cenderung “jalan sendiri”. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput (*grassroot*) dan memahami akar konflik. Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan tersebut bahwa semua golongan tersebut memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik sosial.

Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Pencegahan konflik yang

tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kebijakan Presiden Habibie Terhadap Konflik Aceh

Saat Bacharuddin Jusuf Habibie ditabalkan sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soeharto, Aceh masih bergejolak. Konflik menuntut kemerdekaan dan referendum sedang di puncak. Presiden ikut meredamnya.

Aksi besar-besaran menimbulkan gejolak terus-menerus, tak terkecuali di Aceh, memaksa Presiden Soeharto turun takhta. Beliau mengumumkan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi presiden.

BJ Habibie, yang saat itu Wakil Presiden Indonesia, ditunjuk menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden. Presiden ke-3 ini menjabat singkat, selama 517 hari menyelesaikan sebagian persoalan Indonesia.

Salah satu persoalannya adalah konflik di Aceh, sama halnya dengan Papua dan Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste). Gerakan pemberontakan memerdekakan Aceh dari Indonesia, yang dipelopori Gerakan Aceh Merdeka (GAM), semakin besar pascakejatuhan Soeharto.

Habibie mencoba mengambil peran lewat kebijakannya. Pertama, memerintah Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Wiranto datang sendiri ke Lhokseumawe, Aceh, mengumumkan kebijakan itu pada 7 Agustus 1998.

DOM ditetapkan di Aceh oleh Presiden Soeharto untuk menumpas Aceh Merdeka sejak 1989, dengan sandi operasi Jaring Merah. Selama sembilan tahun, status itu menimbulkan ribuan korban di Aceh, disertai dengan penculikan dan

penangkapan warga sipil.¹⁵

Kebijakan mencabut DOM yang dikeluarkan BJ Habibie, disertai dengan beberapa kebijakan lain, membongkar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini. Beliau mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999, tentang Pembentukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA). Juga dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus-kasus selama DOM Aceh.

Mengutip Laporan HAM 2005 oleh KontraS, beberapa kasus pelanggaran HAM diusut oleh tim tersebut, di antaranya kasus Rumong Geudong di Pidie, kasus pembantaian warga di Idi Cut, kasus pembantaian warga di Simpang KKA Lhokseumawe, dan kasus pembunuhan massal di Pesantren Tgk Bantaqiyah di Nagan Raya. Kasus terakhir berhasil masuk pengadilan koneksitas dengan menghukum sejumlah pelaku.

BJ Habibie terus memberikan perhatian serius kepada Aceh, menghendaki penyelesaian Aceh yang lebih komprehensif, adil, dan bermartabat.

Niat baik itu ikut dirasakan sejumlah tahanan politik yang ditangkap karena terkait Gerakan Aceh Merdeka. Pertengahan Maret 1999, BJ Habibie mengeluarkan keputusan pemberian amnesti kepada sekitar 40 anggota GAM yang ditahan. Di antaranya adalah Alm. Ishak Daud dan mantan Ketua DPRA Aceh (2009-2014), Hasbi Abdullah.

Gejolak terus muncul, BJ Habibie sempat berkunjung ke Aceh pada Jumat, 26 Maret 1999. Dia didemo ribuan mahasiswa yang menginginkan konflik segera berakhir di Aceh. Gerakan Referendum Aceh mulai muncul, sejak Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) dibentuk pada 4 Februari 1999.

¹⁵ Adi Warsidi, BJ Habibie dalam Konflik Aceh: Presiden yang Meminta Maaf, <https://kumparan.com/acehkini/bj-habibie-dalam-konflik-aceh-presiden-yang-meminta-maaf-1rqf3XvH7du>

Gerakan yang sama juga muncul di Timor Timur.

Dalam pidatonya usai salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, BJ Habibie menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama penerapan DOM sejak 1989-1998. Salah satu dosa Pemerintah Pusat di Serambi Makkah. Janji-janji pun disampaikan untuk memberikan keistimewaan kepada Aceh.

Sejalan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas sebuah undang-undang untuk memperjelas status Aceh sebagai Daerah Istimewa. Dikutip dari buku Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah (HM Kaoy Syah, 2000), usulan inisiatif ini datang dari sejumlah wakil Aceh di DPR-RI.

Sejatinya, status Daerah Istimewa Aceh telah disematkan sejak 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, saat pemberontakan DI/TII masih terjadi di Aceh. Namun keputusan itu tak berjalan maksimal.

Setelah pembahasan beberapa bulan, pada 4 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan. UU ini dinilai sebagai upaya BJ Habibie meredam konflik Aceh.

Gerakan menyuarkan referendum terus berlanjut. Aktivis SIRA dan rakyat Aceh kerap membanding-bandingkan dengan keberhasilan Timor Timur yang menyelenggarakan referendum di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa Bangsa pada 30 Agustus 1999. Wilayah itu akhirnya lepas membentuk negara sendiri, Timor Leste.

Sampai akhirnya, enam tahun kemudian, konflik diselesaikan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM

menandatangani kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia.

Konflik Terbaru Papua

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyebut, sebanyak 20 negara di dunia ikut menyebarkan hoaks terkait kondisi Papua dan Papua Barat.¹⁶ Anehnya ada pihak yang menuduh itu ulah RR China, padahal RR China tidak termasuk negara yang menyebarkan hoax. Sebagaimana ulasan saya terdahulu bahwa masalah Papua dan Papua Barat, adalah karena operasi inteligent asing yang didukung oleh proxy dalam negeri. Tujuannya jelas yaitu menjatuhkan Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan, kalau bisa sebelum Oktober, Jokowi gagal dilantik. Mengapa ?

Sebetulnya bukan Jokowi yang dibenci tetapi kebijakan Presiden Jokowi yang membuat asing meradang marah karena tidak bisa lagi menguasai SDA Indonesia seperti maunya mereka, dan para proxy punya ambisi mengubah Pancasila. Dengan Pancasila hilang maka terpecah pecah lah Indonesia dan asing mudah mengontrol Indonesia seraya memanjakan para proxy dengan limpahan kemewahan ala Sultan-sultan tempo dulu sebelum Indonesia merdeka.

Pereintah sangat paham permainan Politik yang sedang terjadi. Yang pertama dia tegaskan bahwa kekacauan politik itu akan diselesaikan secara hukum. Siapapun yang terbukti anarkis dan provokator akan berhadapan dengan Hukum. Sementara kebijakan nasional soal Papua dan Papua Barat tidak akan berubah. Indonesia akan terus melanjutkan pembangunan di Papua. Ini soal keadilan.

¹⁶ Erizeli Jelly Bandaro, artikel page facebook: Papua, Papua Barat sudah normal, https://www.facebook.com/groups/1264303027019995/search/?query=Konflik%20Papua&epa=search_box

Sementara aktor Politik yang merupakan otak dari kekacauan di Papua dan Papua Barat tetap tidak akan tersentuh. Sama dengan aksi 411, 212, 23 Mey. Walau data intelijen membuktikan keterlibatan mereka. Namun Presiden Jokowi tidak ingin *head to head* dengan aktor politik itu. Namun kebijakannya akan membuat aktor politik itu semakin kehilangan akses terhadap jaringannya, seperti tikus yang terjebak di dalam ember berisi air. Lambat laun akan mati sendiri.

Kini situasi Papua dan Papua Barat sudah bisa dikendalikan. TNi dan Polri praktis sudah menguasai situasi sepenuhnya. Keamanan sudah kondusif. Selanjutnya pendekatan cinta akan terus ditingkatkan kepada rakyat Papua. Bahwa mereka adalah anak bangsa, dan berhak atas keadilan sumber daya. Pada waktu bersamaan program memotong jaringan politik para *bigot* (pemakar, red.) dan antek asing sedang berlangsung terus. Hanya masalah waktu, sistem negara akan menyelesaikan itu semua secara elegant.

Sikap Presiden Jokowi Terhadap Konflik Papua

Masalah (papua) itu bersumber dari dua ekkses. Satu ekkses internal dan eksternal. Eksternal adalah ketidak sukaan AS atas konsep Indo Pacific yang diajukan oleh Indonesia.¹⁷ AS merasa kehilangan kendali secara politik atas Indo pacifik khususnya berkaitan dengan masalah laut china selatan. Indonesia tidak bisa menggunakan hak teritorialnya terhadap selat Malaka dg membatasi dilintasi kapal dagang asing yang mayoritas kapal dari China. Indonesia tidak bisa membuat aturan diskriminasi terhadap kapal asing. Artinya semua kapal asing bebas melintasi selat Malaka sesuai dengan aturan

¹⁷ Erizeli Jelly Bandaro, artikel page facebook: Jokowi terhadap kerusuhan Papua, https://www.facebook.com/groups/1264303027019995/search/?query=Konflik%20Papua&epa=SEARCH_BOX

Indonesia. Kecuali kapal perang. Harus izin dari pemerintah Indonesia. Itupun yang berkaitan dengan besar lambung kapal dan jenis bahan bakar.

Mengapa? Indonesia harus mengacu kepada Konvensi hukum laut 1982 dan masalah hak lintas kapal asing. Yang kemudian tanggal 31 Desember 1985 telah terbit Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Jadi tidak mungkin Indonesia harus mengikuti konsep AS tentang Indo pacific yang menjadikan Indonesia sebagai proxy AS di kawasan laut china selatan pada khususnya dan pacific pada umumnya. Soal persetujuan antara AS dan China di laut china selatan, itu bukan urusan Indonesia. Dan Indonesia tidak bisa berpihak kesalah satunya. UUD kita menjamin politik international bebas aktif.

Masalah eksternal itu tentu juga berhubungan dengan tekanan AS terhadap Indonesia berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor mentah barang tambang mineral dan rencana revisi UU Migas yang pro kepada kepentingan nasional. Pada waktu bersamaan elite politik di jakarta memanfaatkan faktor eksternal ini untuk membonceng mendapatkan bargain politik terhadap issue nasional yang lebih menguntungkan Presiden Jokowi. Kalau mereka mampu maunya menjatuhkan Presiden Jokowi. Tetapi langkah itu mudah dibaca oleh Jokowi. Makanya Jokowi memilih bersafari naik sepeda di Borobudur daripada mengunjungi Papua, yang justru itu akan membuat Jokowi trap bila keadaan tak terkendali setelah kunjungan ke Papua itu.

Masalah Papua akan selesai dengan elegan. AS tidak akan berbuat lebih jauh terhadap Papua. Karena secara politik resmi gedung putih menghormati sikap Jokowi. Yang ngeyel hanya elite politik AS yang jadi proxy TNC.

BAB 5

SUMBER KONFLIK AKIBAT TENDENSI PRIMORDIAL

Sumber konflik juga berasal dari sentimen primordial atau primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Bentuk sentimen primordial ini seringkali "diagung-agungkan" oleh masyarakat era kini, terutama saat waktu-waktu menjelang pemilihan kepala daerah. Pada zaman dahulu, memang sentimen primordial ini seringkali digunakan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka, namun apakah sentimen primordial ini masih relevan untuk digunakan hingga era kini? Mari kita tinjau sisi positif dan negatifnya.¹⁸

Dari sisi positifnya, sentimen primordial berfungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Yang utama adalah dapat meneguhkan rasa cinta terhadap suku tersebut ataupun terhadap tanah air Indonesia. Kemudian hal ini juga bisa berakibat mempertinggi kesetiaan kepada bangsa serta patriotisme. Selain itu juga dapat menjaga keutuhan dan stabilitas budaya. Namun juga terdapat beberapa hal negatif. Dengan adanya sentimen primordial, bisa saja merusak persatuan dan kesatuan karena terlalu "menonjolkan" suatu suku saja. Dampak negatif dari hal ini diantaranya mengganggu

¹⁸ Michael Agung, artikel Sentimen Primordial, Masihkah Relevan Hingga Kini? <https://www.kompasiana.com/michaelagung/58316c0b82afbd9e0ae1f3a2/sentimen-primordial-masihkah-relevan-hingga-kini>

kelangsungan hidup suatu bangsa, menghambat modernisasi karena pola pikir masih kedaerahan, dan bisa merusak integrasi nasional. Selain itu, yang terburuk adalah bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Jika dilihat dari segi politik saat ini, menjelang pemilihan kepala daerah, sentimen primordial memang memiliki beberapa keuntungan. Dengan sentimen primordial, pemimpin yang dipilih jelas sudah mengenal betul kondisi dan keadaan daerah tersebut. Selain itu, pemimpin yang dipilih sudah tentu cukup dekat dengan para rakyatnya. Namun, apakah tipe pemimpin seperti itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, disaat kehidupan sudah serba modern? Apakah kita rela menyerahkan nasib 5 tahun daerah kita kepada orang yang kurang kompeten jika ada kandidat lain yang lebih kompeten meski ia bukan putra daerah? Apakah jika pemimpin sudah mengenal lebih baik, pasti hasilnya juga lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita renungkan. Setelah itu, barulah kita bisa menentukan apakah sentimen primordial masih relevan hingga kini atautah tidak.

Perseteruan Satu Darah

Salah satu sumber konflik diantaranya adalah hubungan darah. PD I mengubah wajah dan politik dunia. Terutama, di Eropa yang saat itu masih didominasi tiga monarki dan Timur Tengah. Kini, hanya satu yang bertahan, Kerajaan Inggris dengan ratunya Elizabeth II.¹⁹ Padahal, PD I sebetulnya merupakan konflik dari rivalitas tiga monarki adidaya saat itu: Kerajaan Inggris, Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Rusia. Uniknyanya, ketiga penguasa monarki yang berseteru itu masih satu darah! Raja Inggris George V, Kaiser Jerman Wilhelm II, dan Tsar Rusia Nikolai II, menurut sejarawan Margaret MacMillan dalam *The Rhyme of History: Lessons of the Great War*, tak lain

¹⁹ <https://historia.id/militer/articles/konflik-keluarga-dalam-perang-dunia-v5E73>

adalah saudara sepupu.

MacMillan meringkas garis keturunan ketiganya berakar dari Dinasti Hohenzollern (Prusia). Ketiga raja tadi merupakan keturunan Raja Frederick William III dan Ratu Luise (Louise of Mecklenburg-Sterlitz). “Kaiser Wilhelm II dan Raja George V adalah sepupu pertama, sebagaimana Raja George V dengan Tsar Nikolai II. Sementara Kaiser Wilhelm II dan Tsar Nikolai II adalah sepupu ketiga,” sebutnya.

Ibunda Kaiser Wilhelm II, Putri Victoria Adelaide Mary Louisa, adalah kakak dari Raja Edward VII (ayah Raja George V). Sementara ibu Raja George V, yakni Ratu Alexandra/istri Raja Edward VII, adalah kakak dari Ratu Dagmar/istri Tsar Alexander III (ibu Tsar Nikolai II). Tiga Saudara Dipisahkan Perang.

Satu dari sekian pemicu Perang Dunia I adalah pembunuhan Franz Ferdinand, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria, oleh Gavrilo Princip dari Mlada Bosna (Milisi Pemuda Serbia-Bosnia) pada 28 Juni 1914. Pembunuhan itu membuat Austria-Hungaria menyerang Serbia. Lantaran Serbia disokong Tsar Nikolai II yang tengah menggencarkan propaganda Pan-Slavisme, Austria-Hungaria mencari dukungan kepada Kaiser Wilhelm II. Awalnya Kaiser tak ingin Perang Balkan antara Austria-Hungaria- Kesultanan Ottoman vs Serbia-Bulgaria-Yunani, meluas, meski sakit hati akibat sohibnya, Franz Ferdinand telah dibunuh. Perihal ini sempat digambarkan dalam film bertema pengasingan Wilhelm II di Belanda semasa Perang Dunia II, *The Exception* (2016).

Seperti yang kita amati tiap hari di televisi, kerusuhan kerap terjadi di masyarakat luas di dunia. Adapun berbagai sebab yang mendasarinya seperti faktor Ekonomi, Politik, Perbedaan menjadi hal yang lumrah untuk dijadikan pondasi membentuk sebuah kerusuhan yang merugikan masyarakat

luas yang bahkan tidak tahu menahu mengenai konflik tersebut. Seringkali, saudara yang tinggal dalam satu rumpun, yang hidup dalam satu daerah melakukan “perlawanan” terhadap saudaranya sendiri hanya karena sedikit perbedaan yang memisahkan mereka.²⁰

Konflik satu darah inilah yang mempunyai kemiripan yang cukup signifikan dengan konflik Etnis. Tentunya, etnis-etnis yang berseteru seringkali tinggal dalam wilayah yang cukup dekat satu sama lain. Bahkan hanya berjarak sekitar satu atau dua desa saja. Namun karena kesalah pahaman yang ada, maka permusuhan antara mereka tidak bisa dicegah. Salah paham bisa jadi sebab yang mematikan bila dari awal sudah disalah artikan. Salah paham bisa dibetukan dengan mediasi dan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas suatu masalah yang ada. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang “gengsi” untuk memulai suatu aksi perdamaian. Padahal, aksi perdamaian tersebut sangat diperlukan untuk mencegah konflik di masa yang akan datang.

Walaupun begitu, konflik antar Etnis tidak serta merta dikarenakan oleh kesalah pahaman, namun juga ada banyak sekali faktor pendukung di belakangnya. Kita akan ulas mulai berikut ini:

1. Pelanggaran Norma

Norma adalah suatu pilar yang penting untuk hidup bermasyarakat. Untuk hidup dengan damai dan teratur, kehadiran norma di kehidupan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kurang menyenangkan pada masyarakat. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia ini, tentunya banyak sekali juga norma yang bermacam-macam, yang sesuai dengan keyakinan etnis tersebut. Nah, itulah kenapa konflik bisa pecah karena pelanggaran norma.

²⁰ <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-antar-etnis>

Pelanggaran norma oleh Etnis lain bisa memicu adanya kemarahan dalam hati masyarakat, terlebih lagi norma tersebut sudah kita junjung sejak lama. Entah itu memang sengaja atau tidak, terkadang dari awal pelanggaran norma tersebut bisa menimbulkan kesalah pahaman. Suatu Etnis bisa saja tidak mengetahui sama sekali suatu norma yang mana dianut oleh etnis yang ada di dekat mereka. Ketidaktahuan akan norma tadi akhirnya yang menjadi sumber masalah kenapa konflik antar Etnis bisa disebabkan karena norma.

2. Politik

Kita tentunya punya suatu idola. Kita akan melakukan hal apapun untuk membela idola kita. Karena menurut kita dialah yang pantas untuk menjalankan amanat kepemimpinan dan menegakkan keadilan bagi semua. Bagaimana menurut pandangan orang lain? Bisa saja berbeda. Perbedaan pendapat mengenai pemimpin inilah yang kadang membuat kerenggangan hubungan antar etnis satu dengan lainnya.

Etnis yang membela salah satu calon bisa saja karena mereka ingin dan ikhlas dari hati, namun bisa saja karena mereka mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan calonnya. Yang paling parah, "pemberian bantuan" oleh suatu calon kepada etnis tertentu bisa menimbulkan rasa hutang budi pada etnis tersebut. Namun terlepas dari apapun yang bisa menyebabkannya, persaingan dalam kancah politik inilah yang memiliki imbas buruk dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang fanatik terhadap pilihannya.

Padahal, konflik tersebut tidak seharusnya terjadi. Sebuah hal konyol apabila politik bisa menimbulkan suatu permusuhan, mungkin ini tepat bagi kaum yang kurang terdidik pendidikan tinggi dan malas berfikir. Perbedaan itu pasti ada, pasti terjadi di kehidupan kita. Namun alangkah baiknya, perbedaan tersebut bisa dijadikan peluang untuk menjadikan

pemimpin yang kita pilih nanti memiliki kualifikasi serta kemampuan mumpuni namun memiliki cara pandang yang berbeda. Tentunya itu hal baik bukan? Memilih seseorang yang paling sesuai dengan keadaan negara dengan cara memimpin yang khas.

3. Sejarah Kelam

Sejarah di masa lalu merupakan pelajaran berharga untuk masa yang akan datang, itulah paling tidak hal yang harus dipahami sebagai dasar hidup untuk manusia. Namun sayangnya, banyak dari kita yang masih terbayang akan kejadian buruk di masa lalu dan tidak sanggup / tidak terima untuk melupakannya. Setidaknya itulah hal yang masih terngiang di pihak yang berkonflik, terbayang perbuatan buruk etnis lain pada etnisnya yang padahal sudah terjadi di masa yang teramat lampau.

Sejarah memang bisa menjadi pelajaran yang istimewa, namun bisa menjadi petaka apabila kita masih “terjebak” di dalamnya. Seburuk-buruknya manusia, adalah orang yang masih terjebak dalam suatu waktu yang kita sebut dengan sejarah. Pikirannya “stuck” pada suatu momen, dan dari momen tersebut ia melahirkan dendam untuk etnis tertentu. Berbekal dari ingatan momen itu, ia memprovokasi masyarakat lain untuk memerangi etnis yang lain berdasarkan “ingatan” sejarah buruk.

Hal ini tentunya disayangkan, karena padahal ada peluang-peluang baik kedepannya yang bisa dilakukan dengan etnis lain. Padahal bisa saja di waktu yang akan datang mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi misalnya, untuk membangun desanya menjadi semakin baik dan lebih maju. Sejarah kelam tadi sebenarnya bisa dirubah menjadi lahan untuk introspeksi dan berbenah diri. Melakukan hal yang terbaik untuk menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan

bermasyarakat dengan dibekali pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan yang ia dapat melalui sejarah-sejarah yang telah terjadi.

Isu SARA Perang Ambon

Indonesia dikenal memiliki keberagaman suku, etnik, adat, agama, dan bahasa, dimana ada lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 200 bahasa daerah. Agama di Indonesia juga beragam, dimana agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Konghucu hidup bersama dalam satu negara yang luas ini. Maka dari itu, Indonesia memiliki julukan negara pluralisme dengan berbagai budaya, agama, dan bahasa yang disatukan dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Meskipun begitu, hal ini tidak menghapuskan kemungkinan terjadi konflik antar kelompok. Karena latar belakang dan cara pandang yang berbeda, kesalahpahaman sering muncul dan menjadi akar dari sebuah konflik yang ada. Salah satu konflik yang muncul di Indonesia akibat kesalahpahaman ini adalah konflik Ambon yang dikenal sebagai konflik berdarah dengan menewaskan hampir 5.000 nyawa dan berlangsung dari tahun 1999. Seluruh pertikaian tentunya ada penyebabnya.²¹

Artikel ini akan membahas penyebab dari tragedi Sejarah Perang Ambon, sebagai berikut:

- ***Konflik Lokal***

Awal dari perang Ambon ini bermula dengan permasalahan yang cukup sederhana, dimana salah satu pemuda Muslim dari keturunan Bugis ingin meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut

²¹ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-perang-ambon>

dan pemuda Mardika bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun bersulut amarah hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Hal ini berujung hingga pemuda mardika membawa parang untuk membunuh.

- *Perang Antar Desa*

Preman tersebut yang berhasil kabur kemudian berkata kepada warganya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa cek dan ricek atau berpikir panjang, lantas warga marah atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar beserta Gereja Silale. Atas terbakarnya Gereja Silale, warga dari kampung-kampung sekitar Mardika marah dan ikut menyerang kembali warga Muslim. Akibat konflik SARA ini, banyak warga terluka, ratusan rumah hancur, fasilitas umum, hingga gereja setempat. Konflik ini juga merambat ke beberapa daerah hingga pada akhirnya, kota Ambon menjadi porak poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antara daerah kawasan Muslim dengan kawasan Kristen.

- *Pemilu*

Pada Juli 1999, suasana di Ambon sudah mulai tenang dan membaik. Tetapi hal ini tidak bertahan lama karena adanya ketegangan pemilu di daerah Poka dan meluas ke bagian Ambon lainnya. Masyarakat juga semakin waspada akan situasi dan akhirnya menyiapkan senjata untuk melindungi diri seperti parang. Di Ambon, hanya tersisa satu desa yang masyarakatnya masih tetap berbaur, yaitu desa Wayame.

- *Kerusuhan Setelah Kunjungan Presiden*

Konflik kemudian bermula lagi di Pulau Seram dan Pulau Buru, dimana pada saat itu warga telah sigap dan siaga. Setelah kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Ambon, kerusuhan

memuncak dan memanas di beberapa wilayah di Ambon. Konflik ini berakhir dengan hilangnya banyak nyawa dan ratusan yang terluka. Hingga Januari 2000, kerugian atas kerusuhan ini bahkan tidak terhitung lagi.

- *Adanya Gerakan Jihad*

Ketika kondisi di kota Ambon mereda dan telah dilakukan rekonsiliasi di berbagai tempat, tetapi konflik bukannya mereda, malah muncul gerakan-gerakan Jihad yang berpusat di Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Hal ini meresahkan masyarakat Ambon, terutama kaum non-Muslim. Isu-isu tentang ancaman Jihad mulai bermunculan dan penolakan kedatangan kelompok Jihad Jakfar Umar Thalib juga muncul dari masyarakat Muslim di Ambon. Penolakan tersebut memanas kembali keadaan Ambon yang sempat mereda. Konflik pun terpicu kembali setelah wakil presiden berkunjung ke Ambon dalam acara SBJ. Acara ini juga dihadiri oleh kelompok Milisia Batumerah yang beragama Islam dan juga kelompok Kudamati yang beragama Kristen. Hal ini menyebabkan kerusuhan mulai merebak dan berkepanjangan.

- *Front Kedaulatan Maluku*

Pada saat krisis di Ambon, pemerintah akhirnya melepaskan tangan karena sudah tidak sanggup lagi menangani konflik yang terus berkelanjutan. Kejadian ini membuat bangkitnya Front kedaulatan Maluku yang merupakan pewaris dari Republik Maluku Selatan (RMS). Pemerintah menganggap bahwa adanya kelompok tersebut justru memperkeruh suasana di Ambon. RMS dibentuk pada tahun 1950 dan kelompok tersebut berusaha mengadvokasi kaum separatis dari negara yang didominasi Muslim. Dimana kemudian, RMS dianggap sebagai gerakan Kristen yang memperburuk konflik dinamika agama.

- *Adanya Unsur Lain*

Konflik yang terjadi karena kesalahpahaman ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi kepentingan kelompok tertentu. Ada faktor lain yang menjadi penyebab konflik ini seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dilansir bahwa dulunya, Ambon merupakan daerah dengan Kristen sebagai agama mayoritas. Isu SARA yang menjadi akar permasalahan konflik ini terjadi berulang kali yang berujung pada Ambon yang porak poranda dan berdampak pada kemiskinan dan kesengsaraan bagi warga Ambon.

Isu SARA ini berperan bagai pemicu untuk mengadudombakan dua kelompok besar dan menciptakan kerusuhan yang berlangsung lama. Jika ditinjau kembali, awal dari permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara preman dan supir angkot dan berakhir pada perpecahan antara kedua kubu yang merebut banyak korban jiwa.

Presiden ke Empat Almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut dalang provokator Ambon dengan inisial Jendral "K" yang di kemudian hari menjadi penggerak kerusuhan di Indonesia. Dan ini bisa dibuktikan dengan adanya temuan kasus yang sedang aktual pasca pilpres 2019 ini.

Keadaan Pasca Konflik Ambon

Pada saat perdamaian terjadi yang ditandai dengan penyerahan sejumlah senjata api dan bom rakitan antar dua desa pada tahun 2016. Penyerahan senjata tersebut menjadi peristiwa bersejarah kedua desa dan menjadi akhir dari pertikaian di Ambon. Keadaan setelah konflik berakhir,

1. Masih Ada Provokator

Provokasi masih ada terjadi di sekitar Ambon yang sulit ditelusuri siapa pemicunya. Tetapi warga Ambon telah belajar

dari pengalaman dan tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi, maka masyarakat tidak mudah terpancing lagi.

2. Wilayah Pemukiman Terbagi Dua

Salah satu hambatan yang ada adalah desa yang terpisah-pisah berdasarkan agama. Meskipun warga masih saling berinteraksi, trauma atas kerusuhan masih menghantui mereka sehingga mereka hidup terpisah.

3. Menjalani Persaudaraan yang Terputus

Masyarakat Ambon mulai melihat kembali budaya leluhurnya “Pela Gandong” yang sempat ditelantarkan pada konflik. Pela Gandong merupakan ikatan persaudaraan antar kampung yang biasanya terjadi antar kampung yang berbeda agama.

4. Tidak Mudah Terpancing

Karena masih adanya letupan api-api konflik yang mungkin terjadi, seperti persaingan politik lokal, para tokoh agama setempat tak henti-hentinya berkampanye supaya warga tidak terpancing untuk berkonflik lagi hanya karena Pilkada.

Hingga sekarang, semenjak selesainya perang Ambon tempo hari, daerahnya secara perlahan mulai dipulihkan dengan kesadaran penuh dari rakyat Ambon. Sejarah perang Ambon ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi daerah Indonesia lainnya untuk tidak mudah terpancing yang dapat berujung pada perang panjang.

Dari buku *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*, karya Samsu Rizal Panggabean, Penerbit Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, Tiara Salampessy menuliskan bahwa pada saat ini, tantangan mengenai ujaran-ujaran kebencian membuat masyarakat menjadi renggang, pengelompokan terjadi pada masyarakat, dan membuat orang terkutuk berdasarkan kaplingan identitas.

Kerja-kerja perdamaian tidak hanya terjadi ketika konflik fisik saja, namun kerja-kerja perdamaian adalah kerja sepanjang masa. Tiada henti.

Maluku harus belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjadi contoh. Saat ini Maluku adalah laboratorium perdamaian, maka kerja-kerja bina damai dilakukan oleh segala kalangan, agar orang-orang yang datang ke Maluku dapat belajar apa itu arti perdamaian.

Sekelumit Konflik Agama Di Poso

Kini banyak orang beragama namun tidak bertuhan. Agama diimani dengan tidak mengenali terlebih dahulu siapa diri kita dan dengan demikian kita tidak mampu mengenali Tuhan beserta alam ciptaanNya. Kenapa banyak orang mengaku beragama namun justru menumpahkan darah sesama yang itu dilarang oleh semua ajaran agama?

Banyak dari kita bertanya-tanya, mengapa konflik agama di Poso ini harus terjadi? Berikut ini beberapa faktor penyebab Konflik Poso:²²

1. Faktor Agama

Tidak diragukan lagi, Poso dulunya memiliki mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam. Namun sejak bersatunya beberapa daerah bergabung dalam rangka pemekaran Poso, agama kristenlah yang menjadi dominan. Bukan hanya agama Kristen saja, agama yang berada dalam suku-suku juga ada. Perbedaan agama yang signifikan inilah yang membuat ketidakcocokan antara masyarakat satu dengan lainnya. Didukung dengan rasa kurang toleransi, konflik pun dapat dengan mudah terjadi. Agama juga dijadikan alasan untuk menghancurkan masyarakat lain yang memiliki konflik pribadi

²² Artikel penyebab konflik Poso, <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-poso>

dengan masyarakat tertentu, apalagi juga dengan perbedaan kepentingan yang membuat mereka dibutakan oleh amarah dan akhirnya berujung dengan penumpahan darah.

Sebetulnya, konflik sudah ada jauh sebelum tahun 1998, yaitu pada saat 1992 dimana ada seorang pemuda kristen bernama Roy Rantu yang melakukan pembacokan kepada Ahmad Riwan, salah satu pemuda muslim di Poso. Aksi ini tentunya membuat orang muslim di Poso marah, dan mengajukan protes terhadap tindakan tersebut yang dianggap meresahkan warga dan merugikan masyarakat luas. Hal itulah yang menyebabkan aksi balas dendam dari beberapa warga kristen yang akhirnya melakukan pengrusakan dengan melempari batu ke beberapa masjid di Poso. Mereka tidak terima lantaran agama mereka dianggap jelek dan tidak baik. Namun, ternyata konflik tidak berhenti di situ saja, pihak islam juga melakukan aksi balas dendam. Aksi itu terjadi pada 1995 dimana 3 rumah orang kristen dirusak oleh pemuda Islam, lantaran mereka juga tidak terima perlakuan keji masyarakat kristen dulu. Konflik ini terus berlanjut dan tidak berhenti dikarenakan rasa tidak terima berkepanjangan. Tidak ada pihak yang mengalah, tidak ada yang sabar menerima kenyataan. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah harus melakukan perlawanan kepada pihak lawan.

2. Politik

Bukan hanya agama, berbagai faktor kemanusiaan manusia seperti politik menjadi salah satu Penyebab Konflik Poso. Seperti yang kita tahu, politik tidak hanya dipenuhi oleh berbagai cara seseorang untuk menang dengan jalan kebijaksanaan dan faktor kepemimpinan saja, tapi ada beragam cara yang busuk di dalamnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bernama Herman Parimo yang menjadi tersangka karena meletusnya kerusuhan

Poso 1. Penyerangan ini dilakukan untuk membuat Poso “damai” kembali, melalui jalan yang tidak damai. Segala musuh disingkirkan demi memenangkan si calon agar tidak ada lagi calon lain yang berani untuk menyaingi. Cara yang dilakukan tadi berbuah menjadi konflik yang amat besar, dengan diprovokasi manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan terjadi, dalang dari konflik ini berujung pada DPRD tingkat 1 Poso. Mengapa? Karena adanya ancaman yang berada dalam surat kabar yang isinya apabila Damsyik Jaelani tidak diangkat, maka akan timbul kerusuhan Poso 2 yang lebih dahsyat dari kerusuhan Poso 1. Semua itu masih menjadi bayang-bayang, siapakah sebenarnya oknum di DPRD yang mengeluarkan ancaman itu. Apakah itu semua keinginan dari DPRD sendiri, atau memang ada oknum jahat yang sedang bersarang di DPRD itu sendiri? Kita tidak tahu.

3. Motif Ekonomi

Dalam sebuah mimbar akhir pekan di Jakarta, George J. Aditjondro, peneliti masalah konflik di Indonesia mengemukakan sebuah dugaan bahwa kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, beberapa waktu silam, disinyalir melibatkan unsur / pihak asing. Ini berkaitan dengan keinginan pihak asing agar aparat keamanan dapat dihadirkan untuk melindungi investasi mereka di sana.²³

Sejauh ini operasi intelijen yang dilakukan di Poso adalah satu di antara alat pembenaran tentang keterlibatan mereka. Misalnya, Amerika Serikat sejauh ini memiliki kepentingan bisnis tentang gas alam di wilayah Sulteng.

Sementara itu, Ishak Latuconsina, mantan anggota DPR meminta kepada semua pihak untuk tak menuduh keterlibatan

²³ Berita, Pihak Asing Disinyalir Terlibat Kerusuhan Poso, <https://www.liputan6.com/news/read/64746/pihak-asing-disinyalir-terlibat-kerusuhan-poso>, 19 Okt 2003, 09:08 WIB

(kesalahan, pen.) aparat dalam kerusuhan Poso, meski tentu saja ada aktor intelektual yang berperan besar di balik kerusuhan itu. Selain itu, Ishak juga meminta kerusuhan yang menewaskan sebelas orang itu jangan dikaitkan dengan konflik agama. Pasalnya, agama hanya alat untuk memobilisasi massa.

Itulah, ketiga faktor penyebab pecahnya perang di Poso. Seperti yang kita lihat, konflik di Poso ini termasuk konflik yang kompleks, dan agak rumit untuk diketahui apa sebenarnya penyebab dari semua ini. Walaupun begitu, secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi karena adanya oknum yang jahat membuat masalah dengan memecah belah masyarakat.

Dari dua kasus konflik di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber konflik disebabkan kombinasi antara Hubungan darah, perikatan ras/ suku bangsa, perikatan agama, kepentingan penguasaan politik suatu wilayah, Perikatan adat istiadat dan perbedaan / kesalah pahaman dalam memaknai bahasa komunikasi suku bangsa lainnya.

Peran negara dalam hal ini pemerintah daerah dimana konflik terjadi adalah sebagai mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkonflik.

BAB 6

SUMBER PENYEBAB KONFLIK

Keputusan Hukum Atau Keputusan Politik

Memperhatikan beberapa diskusi tentang isu-isu terkini menyangkut penyelenggaraan negara yang ditayangkan media elektronik dan media sosial belakangan ini, ada satu hal yang menjadi kesamaan dari pandangan beberapa narasumber yaitu mereka seringkali membedakan keputusan politik dan keputusan hukum dalam argumentasinya. Penasaran dengan hal tersebut, saya mencoba mencari definisi hukum dan politik di wikipedia, suatu media informasi yang sangat cocok untuk orang awam.²⁴

Definisi yang lebih baik mungkin saja bisa diperoleh dari pelajaran filsafat hukum atau filsafat politik. Definisi hukum menurut wikipedia: Hukum adalah suatu sistem dari peraturan yang ditegakkan melalui berbagai institusi, Hukum mempengaruhi politik, ekonomi dan masyarakat melalui berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator utama dalam hubungan sosial masyarakat. Sedangkan 'politik' adalah suatu proses dimana sekelompok orang membuat keputusan bersama. Istilah ini umumnya berlaku dalam pemerintah tetapi politik juga juga terjadi dalam interaksi kelompok lain seperti dalam perusahaan, akademis dan institusi agama.

Singkatnya, politik mengandung relasi sosial yang melibatkan kekuasaan, pengaturan oleh suatu kelompok politik dan cara yang digunakan untuk membuat dan menerapkan kebijakan. Dari definisi diatas, tentunya boleh ditarik

²⁴ Artikel kompasiana, Keputusan Hukum atau Keputusan Politik, <https://www.kompasiana.com/h4k4/54ffbe6aa33311c25b510382/keputusan-hukum-vs-keputusan-politik>

kesimpulan bahwa hukum mempengaruhi politik karena hukum sebagai mediator utama dalam hubungan sosial masyarakat dibandingkan dengan politik yang merupakan proses pembuatan keputusan bersama suatu kelompok. Meski kelompok disini mengandung arti yang luas mulai dari kelompok kecil sampai suatu bangsa. Sejatinnya kegiatan politik juga mengacu pada hukum yang berlaku sehingga bisa menghindari terjadinya dominasi atau monopoli interpretasi atas suatu hal oleh kelompok berkuasa. Bukankah kita hanya mengenal prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) bukan *equality before the politic*. Seandainya kita selalu menjunjung tinggi kepentingan umum (diwakili oleh hukum) bukan kepentingan kelompok (diwakili oleh kelompok politik) maka perdebatan yang tidak substansial yang menguras sumber daya bisa dihindari dan dapat digunakan untuk hal lain yang lebih penting.

Kita teringat ungkapan terkenal Manuel L. Quezon berikut yang masih relevan untuk menyikapi kondisi saat ini: "*My loyalty to my party ends when my loyalty my to the country begins*" (Loyalitas saya pada partai berakhir tatkala Loyalitas saya pada negara dimulai) dan ucapan Mark Twain : "*Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it*" (Loyalitas kepada negara itu selalu. Loyalitas kepada pemerintah ketika layak mendapatkannya)

Keputusan Untuk Rakyat

Pejabat pemerintah, orang dan organisasi di luar pemerintahan, masyarakat madani, dan tokoh masyarakat harus diingatkan bahwa Prinsip *Good Governance* harus selalu hadir dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan.²⁵

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt572063933b630/keputusan-untuk-rakyat/>

Dalam teori manajemen modern, sudah baku sekarang ini bahwa suatu proses pengambilan keputusan suatu organisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Ini berlaku di pemerintahan, korporasi maupun organisasi nirlaba sekalipun, dan dimanapun. Pasalnya, konsep pemangku kepentingan, sebagai pihak kepada siapa keputusan harus dipertanggung-jawabkan, bukan lagi konsep hukum yang kaku, definisinya pun tidak jelas, dan banyak peraturan perundangan membuka peluang siapapun di luar organisasi untuk meminta pertanggung-jawaban hukum, administrasi maupun finansial terhadap pemberi keputusan. Konsep pemangku kepentingan sudah demikian abstraknya sehingga kita perlu melangkah setiap kali dengan ekstra hati-hati.

Secara sederhana, bisa kita rumuskan bahwa keputusan yang baik, yang memperhatikan prinsip *good governance*, setidaknya harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut: (i) keputusan dibuat oleh seorang, sekelompok orang atau organisasi yang secara hukum mempunyai wewenang yang sah untuk mengambil keputusan tersebut; (ii) keputusan tersebut dibahas dan dirumuskan sesuai dengan sistem operasi standar internal organisasi terkait, misalnya dilakukan proses persetujuan berjenjang dari inisiatif awal sampai pada pihak yang mempunyai kewenangan tertinggi di organisasi tersebut; (iii) keputusan tersebut adalah sah, dalam arti selalu berada dalam koridor (atau tidak bertentangan dengan) peraturan perundangan yang berlaku, moral serta etika publik yang diterima secara umum; (iv) keputusan tersebut telah melalui tes dampak, baik terhadap pihak internal maupun eksternal, dengan mengujinya pada semua faktor risiko yang relevan, termasuk proses dan tindakan untuk memitigasinya; (v) selain membawa manfaat pada organisasi terkait, keputusan tersebut juga harus berdampak positif terhadap para pemangku kepentingan terkait; (vi) ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil tersebut, dan (vii) dalam hal keputusan tersebut berdampak luas terhadap kepentingan publik, dilakukan juga diseminasi dan

diskusi publik dengan para pemangku kepentingan agar mereka paham bahwa tujuan akhir keputusan tersebut, sekarang atau pada akhirnya, membawa manfaat yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada public (“Prinsip Good Governance”).

Itu tentu kalau kita bicara tentang proses pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat dan negara dimana demokrasi termasuk sistem *checks and balances* bekerja baik, kehidupan berpolitik dilakukan dengan penuh sikap dewasa dan santun, mereka menjunjung etika politik yang umum berlaku, dan perbedaan pendapat disalurkan lewat diskusi yang sehat dan saling menghargai dengan mengingat kepentingan bangsa yang lebih besar, dan pada akhirnya setelah keputusan diambil, keputusan tersebut harus dihargai dan dilaksanakan secara konsekuen oleh semua pihak yang secara hukum tunduk pada keputusan tersebut.

Dalam suatu negara atau masyarakat dimana proses dan praktik bernegara belum matang, seperti halnya kita ini, maka keputusan yang dilakukan dengan menggunakan Prinsip Good Governance tadi belum tentu menjamin hasilnya akan baik, diterima luas oleh publik, dan berlaku efektif waktu dilaksanakan.

Tidak itu saja, yang terpenting adalah apakah pada akhirnya keputusan tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara. Faktor waktu dan kondisi sekitar juga sangat mempengaruhi efektivitas dan manfaat keputusan tersebut. Keputusan yang dilakukan semasa suatu krisis, akan berbeda dengan keputusan yang dilakukan dalam kondisi yang tenteram dan kondusif. Keputusan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan yang kuat dengan kontrol kuat pimpinan tertinggi eksekutif, akan berbeda dengan keputusan yang diberikan oleh suatu pemerintahan dimana pembagian kekuasaan sangat cair dan menyebar ke banyak sektor. Keputusan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan, organisasi atau orang atau sekelompok orang yang korup akan sangat berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersih. Suatu keputusan yang diberikan oleh orang atau

sekelompok orang yang populis demi kelanggengan posisi politiknya akan juga berbeda dengan orang atau sekelompok orang yang hanya ingin agar keputusannya memberi dampak positif untuk kepentingan publik.

Sejarah kata sebagian orang baiknya hanya untuk diingat, tapi tidak untuk mengikat kita. Tetapi sejarah kelam, tragedi, dan kecerobohan luar biasa yang merupakan dampak dari keputusan seorang, kelompok orang atau organisasi perlu untuk diingat, dijadikan bahan pelajaran, dianalisa untuk mencegah pengulangan sejarah hitam, digunakan sebagai dasar proses judicial, dan mungkin kadang-kadang perlu juga untuk dijadikan bahan bandingan sebelum keputusan serupa akan diambil.

Di depan kita masih akan ada keputusan-keputusan penting lain yang mungkin harus dilakukan seperti misalnya: (a) menjawab usulan segelintir orang untuk kembali ke UUD 1945, (b) menjawab usulan untuk mengubah UU KPK yang terkesan sebagai "negara dalam negara", (c) menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat 1965 dan peristiwa-peristiwa serupa, (d) meninjau kembali sejumlah UU penting seperti misalnya UU Pemilu, UU Otonomi Daerah, dll, (e) memberlakukan moratorium ijin tambang dan penggunaan hutan, (f) memberlakukan moratorium reklamasi, (g) meneruskan atau tidak pemberlakuan amnesti pajak, (h) meneruskan agenda reformasi hukum dan reformasi birokrasi, dan sebagainya.

Apapun masalahnya, pejabat pemerintah, orang dan organisasi di luar pemerintahan, masyarakat madani, dan tokoh masyarakat harus diingatkan bahwa Prinsip Good Governance di atas harus selalu hadir dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Keputusan hari ini tidak hanya menjawab masalah dan kepentingan hari ini. Keputusan yang terpusat pada kepentingan orang, sekelompok orang atau organisasi tertentu harus tidak boleh lagi dilakukan. Keputusan yang akan menimbulkan trauma bagi bangsa juga tidak boleh lagi terjadi. Memang sulit untuk menjadi

negarawan, akan tetapi akan lebih mudah kiranya jika mereka mencoba untuk tidak menjadi pihak-pihak yang merusak kehidupan bernegara dan berbangsa, kini maupun di masa datang.

Demoralisasi Sosial

Salah satu akibat terbesar pada hidup dan kehidupan manusia serta masyarakat, yang tidak peduli pada agama [dan Tuhan] adalah adanya suatu sikon yang oleh para praktisi pendidikan, sosiolog, dan kaum agamawan sebut sebagai dekadensi moral. Dekadensi berasal dari kata *dekaden* [keadaan merosot dan mundur] dan *moral* atau *akhlak*. Dengan demikian, dekadensi moral merupakan atau bermakna sikon moral yang merosot [jatuh] atau sementara mengalami [dalam keadaan] mundur ataupun kemunduran; kemunduran dan kemerosotan yang terus menerus [sengaja ataupun tidak sengaja] terjadi serta sulit untuk diangkat atau diarahkan menjadi seperti keadaan semula atau sebelumnya.

Di samping ketidakpedulian pada agama, sikon sosia-kultural masyarakat yang buruk; motivasi agar memperoleh kepuasan melalui banyak [adanya] harta benda; serta berbagai faktor dan kejahatan lainnya, mempunyai andil besar pada dekadensi moral masyarakat di banyak tempat dan pada berbagai bangsa. Karena paduan sikon yang buruk dan upaya mencapai semua keinginan hati, biasa membangun motivasi untuk memenuhinya dengan berbagai cara. Jika upaya pemenuhan itu tidak tercapai dengan hal-hal wajar, normal, baik dan benar, maka akan beralih melalui pelanggaran hukum, norma, etika, dan seterusnya. Dan ketika seseorang memasuki peralihan tersebut, maka ia telah terjerumus ke dalam dekadensi moral.

Dekadensi moral bukan lingkaran kekuatan ataupun lingkungan yang membentuk manusia agar bertindak negatif serta menabrak nilai-nilai standar kebaikan hidup dan kehidupan. Tetapi, sifat dan sikap negatif manusia lah yang menciptakan atau memperlihatkan dekadensi moral.

Pada sikon tersebut, manusia telah menciptakan ketidakteraturan dengan cara mematahkan rambu-rambu moral dan teguran suci suara hatinya, sehingga berdampak pada kerusakan sistem sosial-kultural dan hukum serta norma-norma, dan lain sebagainya yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Akibatnya, hampir semua sistem dalam komunitas tersebut menjadi rusak dan mengalami degradasi serta dekadensi.

Dan dalam sikon yang rusak tersebut, orang-orang beriteraksi di dalamnya, karena berbagai kepentingan, dipaksa dan terpaksa untuk mengikuti atau ikut terjerumus pada arus kerusakan. Mereka, secara bersama ataupun sendiri-sendiri, akan bersikap dan berperilaku yang sama; sama-sama memelihara kerusakan, pelanggaran norma, peraturan, dan undang-undang, serta ketidakteraturan lainnya agar dapat mencapai keuntungan lalu mampu memenuhi semua keinginan hatinya.

Realitas hidup dan kehidupan manusia yang mencerminkan dekadensi moral dapat terlihat pada kata dan perilakunya sehari-hari. Dekadensi moral dapat dan mudah terjadi pada orang-orang tertentu, manusia secara individu, kelompok atau komunitas masyarakat, kumpulan atau pun institusi sosial, pemerintah, maupun keagamaan. Hal-hal itu, tercermin dengan adanya ketidaksiplin, pelanggaran HAM, KKN, berbagai tindak manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, perselingkuhan, pelacuran, perampokan, pembunuhan, kriminalitas, serta berbagai kejahatan dan penyimpangan lainnya.

Dekadensi moral ada pada masyarakat maju dan berpendidikan di perkotaan; namun bisa muncul pula pada masyarakat yang belum maju di pedesaan. Terjadi pada lingkungan rakyat biasa; ada juga pada tataran birokrat, politisi, pemegang kekuasaan, pemangku jabatan struktural maupun fungsional, bahkan keagamaan. Hal tersebut, juga bermakna bahwa setiap orang [dalam jabatan dan fungsional apapun] berpeluang terjerumus ke dalam sikon dekadensi moral. Dengan itu, dapat dipahami bahwa tidak

sedikit tokoh-tokoh terkenal ataupun pemimpin yang mempunyai tampilan diri ganda, yang sebetulnya merupakan suatu kemunafikan.

Pada satu sisi, ia adalah sosok idola yang bersih, ramah-tamah, baik hati, suku menolong, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, ia mempunyai sikap serta tindakan dan perilaku moral yang jauh dari kejujuran, kesetiaan dan ketaatan kepada TUHAN, ia penuh dengan kemunafikan, dan lain-lain. Manusia berwajah ganda seperti itu ada di mana-mana; mereka menderita penyakit moral yang menyerang seluruh eksistensi hidup dan kehidupannya, serta mudah menjangkiti orang lain.

Demoralisasi sebagai suatu kondisi dimana moral atau standar moral suatu lingkungan, baik dalam lingkup besar maupun kecil mengalami penurunan atau pengurangan.²⁶

Menurut wiktionary.org, demoralisasi merupakan suatu kondisi kemerosotan akhlak atau kerusakan moral. Demoralisasi banyak terjadi di kalangan remaja yang cukup memprihatinkan semua pihak.

Definisi lainnya, demoralisasi adalah suatu kondisi penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol serta akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Arus globalisasi tersebut akan terus menggerus nilai dan kearifan lokal.

Pengertian Demoralisasi Menurut Para Ahli

Menurut Ahmad Muslid dkk (2015), demoralisasi adalah merosotnya atau menurunnya moral/akhlak seseorang yang tercermin pada perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai di dalam masyarakat. Contoh demoralisasi adalah pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Demoralisasi perlahan-lahan meningkatkan kriminalitas di dalam suatu

²⁶ <https://www.freedomnesia.id/demoralisasi/>

masyarakat.

Menurut Prof. Dr. H. Duski Samad, M.A g (2013), demoralisasi adalah kondisi dimana moral tak lagi menjadi pegangan hidup dalam melakukan suatu tindakan. Orang yang terjangkai pentakit demoralisasi dapat dikatakan sebagai manusia yang bejad yang tak lagi menghiraukan aturan moral serta norma yang berlaku di dalam kehidupan.

Faktor Terjadinya Demoralisasi di Suatu Negara

Beberapa indikasi yang menunjukkan suatu bangsa mengalami gejala demoralisasi adalah sebagai berikut.

- Kuantitas dan kualitas kriminalitas sosial semakin meningkat, seperti pencurian, perampokan, dan penghilangan nyawa orang lain.
- Terjadinya kerusuhan yang bersifat anarkis, seperti pembakaran rumah, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan.
- Konflik sosial semakin marak, baik vertikal maupun horizontal.
- Tindakan korupsi merajalela.
- Meningkatnya jumlah pemakai dan pengedar narkoba di kalangan masyarakat.
- Pergaulan bebas semakin merajalela.
- Penyebab Terjadinya Demoralisasi di Masyarakat.

Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan demoralisasi di kalangan masyarakat.

- Krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja.
- Menurunnya kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan tidak berhasilnya pemerintah memenuhi tuntutan rakyat.
- Meningkatnya angka kemiskinan.

- Menurunnya kualitas para aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman,
- Adanya sikap-sikap negatif, seperti malas, boros, dan tidak disiplin, serta sikap apatis yang akhirnya untuk mencapai sesuatu menggunakan jalan pintas.
- Keengganan memahami, mendalami, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama.

Solusi Demoralisasi

Beberapa solusi untuk upaya pencegahan ataupun setelah terjadinya demoralisasi yaitu sebagai berikut.

- Mempertebal keimanan dan ketakwaan di kalangan generasi muda.
- Memanfaatkan media sosialisasi bersama keluarga dan sekolah.
- Pemuda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan positif dan patriotis.

BAB 7

STRATEGI NEGARA DALAM MENGELOLA KONFLIK

Penerapan Surveillance (pengawasan ketat)

Dalam kehidupan sosial friksi, konflik dan pertikaian antarwarga masyarakat tidak mustahil terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.

Dalam menangani konflik sosial negara harus hadir dengan beberapa metode misalnya dengan menerapkan metode pengintaian (*surveillance*) pada pihak yang berkonflik.

Surveillance sebenarnya berasal dari bahasa perancis yang berarti mengamati tentang sesuatu. Istilah ini awalnya dipakai dalam bidang penyelidikan/ intelligent untuk memata-matai atau pengintaian orang yang dicurigai, yang dapat membahayakan. Mengawasi tindakan orang lain, terutama tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Hal ini berarti surveillance identik dengan pengumpulan data dan penyelidikan / pengintaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik (sosial).

Konflik sosial sebagai suatu bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Tujuan pengintaian / surveillance yaitu:

1. Memprediksi dan mendeteksi dini masalah dan ancaman konflik;
2. Memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki program pencegahan dan pengelolaan konflik;
3. Memasok informasi untuk penentuan prioritas,

pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi dan alokasi sumber daya dalam manajemen konflik.

Salah satu sumber big data adalah video Surveillance: Video surveilans masih transisi dari CCTV ke kamera IPTV dan sistem perekaman, dimana organisasi dapat menganalisis pola perilaku (keamanan dan peningkatan pelayanan).

Saat ini banyak negara maju menerapkan teknologi video surveillance (CCTV surveillance) untuk mendeteksi dini ancaman keamanan sosial / negara dari potensi konflik dan sumber teror. Salah satu negara yang menerapkan ini diantaranya adalah China yang telah maju dalam teknologi surveillance ini. Teknologi ini akan menghasilkan sebuah Big Data yang bisa berupa basis kependudukan, basis perilaku seseorang, kesehatan, pergerakan jaringan/ komunitas dan sebagainya. Dengan teknologi CCTV pengenalan wajah yang sudah berkembang saat ini, mampu membandingkan foto pelaku yang ditangkap melalui kamera CCTV dengan database (kependudukan) milik pemerintah. Hal ini juga bisa berfungsi sebagai tindak pencegahan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terkait Big Data, MGI (2011) menyebutkan manfaat potensial dari big data di antara sektor swasta dan publik, diidentifikasi lima cara Big Data dapat menciptakan suatu value²⁷:

1. Segmentasi audiens untuk menyesuaikan aktivitas: Kapasitas pengumpulan data dan segmentasi audiens didasarkan-database telah menjadi kunci penggerak penggunaan oleh banyak organisasi seni berdasarkan strategi data operasi inti organisasi (seperti database).
2. Menciptakan transparansi : membuat big data dapat lebih mudah diakses oleh yang pihak berkepentingan

²⁷ <https://sis.binus.ac.id/2015/07/30/sumber-dan-manfaat-big-data/>

(stakeholder) yang relevan secara tepat waktu dapat menciptakan nilai yang luar biasa. Dalam hal ini Big Data dapat diintegrasikan sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh lebih efisien.

3. Mendukung / mengganti keputusan manusia dengan otomasi algoritma: Analisa dengan bantuan algoritma dapat meningkatkan pengambilan keputusan, meminimalkan resiko, dan menggali wawasan yang berharga, yang dapat dilakukan secara otomatis. Meskipun keputusannya belum tentu bisa dibuat otomatis.
4. Mengaktifkan eksperimentasi: karena pembuatan dan penyimpanan transaksi dalam bentuk digital, organisasi/ perusahaan dapat mengumpulkan data lebih akurat dan kinerja yang lebih terperinci.
5. Berinovasi model produk dan layanan baru: Big data memungkinkan organisasi membuat produk dan layanan baru, meningkatkan yang sudah ada, dan menciptakan model layanan yang sama sekali baru.

Dengan uraian diatas tentu negara telah dan akan mengadopsi kebijakan pengintaian atau pengawasan yang ketat dalam meminimalisir dan mengeliminir potensi konflik sosial.

Pembangunan Sistem Administrasi Hierarkis

Sistem administrasi negara yang tertib dan hierarkis terbukti mampu menjadi sarana dalam resolusi konflik yang terjadi.

Resolusi Konflik melalui Proses Administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara yang menurut UU atau PP diberi hak untuk menyelesaikan konflik.

Resolusi Konflik dan Kekuatan Militer

Jika kita perhatikan sering terjadi pergantian Presiden, mulai masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Era Reformasi, keadaan ini berpengaruh pula pada kebijakan penanganan konflik di tanah air. Namun semua upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat seringkali menemui kegagalan dan adanya ketidaksesuaian antara keinginan, harapan dengan kenyataan dari kedua belah pihak. Jika dilihat kembali cara penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintahan pusat pada masa orde lama, orde baru dan penanganan konflik oleh pemerintah pusat pada masa era reformasi terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar, dimana pada masa pemerintahan sebelum reformasi penanganan konflik yang terjadi di Aceh seringkali diselesaikan dengan cara militer atau dengan *hard power*, sedangkan pada masa setelah reformasi mulai dibuka resolusi konflik dengan cara dialog untuk menghentikan kekerasan atau dengan cara *Soft Power*.

Berbeda dengan penanganan konflik yang dilakukan pada masa orde lama dan orde baru, pada masa reformasi penanganan konflik di Aceh mulai menemukan opsi baru di luar jalur militer, yaitu dengan mengajak, merangkul, dan menghargai keinginan Aceh, untuk kemudian dapat dijalin kerjasama dan menuju kepada dialog politik terkait resolusi konflik Aceh, namun dalam pelaksanaannya terkadang jalur militer masih digunakan pada masa reformasi, namun opsi baru untuk berdialog setidaknya mulai dilaksanakan pada masa reformasi, terutama pasca jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya.

Dalam penyelesaian konflik internal yang terjadi di Aceh sendiri sudah diupayakan dengan penyelesaian secara mandiri, oleh internal Indonesia tanpa adanya ikut campur dari pihak-pihak lain dari luar, baik berupa LSM, organisasi-organisasi non

pemerintahan maupun organisasi negara-negara kawasan seperti ASEAN atau PBB yang sifatnya internasional. Jika dilihat dari permasalahan memang seharusnya konflik seperti ini dapat diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan negara atau organisasi lain di luar Indonesia.

Hal ini diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik dalam negeri lainnya termasuk Papua Barat dan Papua. Pun pendekatan ini perlu diterapkan dalam menangani konflik-konflik sosial berbau SARA yang dipicu oleh pemahaman dan sikap ekstrimisme dan eksklusifisme.

Pengembangan Sistem Ideologi Yang Solid

Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa Pandangan Hidup (ideologi bangsa). Dengan adanya Dasar Negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Pancasila Sebagai Dasar Negara tentunya memiliki fungsi yang sangat penting.

Ideologi adalah sekumpulan ide yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan, harapan, dan tujuan sosial dari individu, kelompok, golongan atau budaya (The American Heritage dan Dictionary of The English Language, Fourth Edition). Ideologi juga seringkali dipahami sebagai sekumpulan ajaran atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem lain yang ada di sebuah negara. Dengan kata lain, setiap negara pasti memiliki sebuah ideologi.

Ideologi memiliki dimensi untuk bertahan antara lain dimensi realitas, dimensi idealisme dan dimensi fleksibilitas. Apabila tiga dimensi tersebut sesuai dengan perubahan pada zamannya, maka ia dapat bertahan lama. Biasanya ideologi yang

bersifat kaku dan menekan tidak mampu menahan kerusakan bahkan kehancuran.

Ideologi berangkat dari filsafat, aliran filsafat akan membentuk ideologi tertentu sesuai dengan relevansi wilayah dan masanya.

Untuk mengetahui apakah Pancasila sudah ideal untuk menyatukan keragaman, kita melihatnya dari tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi tersebut, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas.

Dimensi *Realitas* menyatakan bahwa sebuah ideologi merupakan interpretasi dari keadaan riil bangsanya sendiri. Ideologi Pancasila telah memenuhi dimensi realitasnya karena Pancasila telah menggambarkan keadaan sesungguhnya dari masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai cermin dari kepribadian bangsa Indonesia karena telah memberikan ciri yang khas bagi bangsa Indonesia untuk dapat dibedakan dengan negara lain. Terdapat kemungkinan bahwa masing-masing sila di dalam Pancasila terlepas dari sila yang lain, akan tetapi, kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Itulah sifat dari Pancasila yang mencirikan bangsa Indonesia, yaitu terdiri atas berbagai suku, agama, pulau-pulau namun tetap merupakan satu kesatuan Indonesia.

Dimensi *Idealitas* menyatakan sebuah ideologi harus mengandung cita-cita dari seluruh elemen masyarakatnya, sehingga suatu bangsa mengetahui tujuan mereka masing-masing. Ideologi Pancasila juga telah memenuhi dimensi idealitasnya, karena Pancasila mengandung cita - cita dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas memuat dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga terdapat nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan

bangsa Indonesia.

Dimensi *Fleksibilitas* menyatakan bahwa sebuah ideologi harus bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman. Pancasila telah memenuhi dimensi fleksibilitasnya karena Pancasila bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman. Pancasila juga terbuka terhadap hal - hal yang baru tanpa kehilangan nilai - nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila juga sering disebut sebagai ideologi terbuka.

Dari ketiga dimensi tersebut, maka sudah tentu Pancasila adalah ideologi terbaik bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan membangun sistem ideologi Pancasila yang solid maka akan menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik anak bangsa.

Peran penting pendidikan moral Pancasila di masyarakat layak disosialisasikan kembali secara intensif, sistematis, massiv dan terstruktur oleh penyelenggara negara kita.

BAB 9

PENDEKATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KONFLIK

Sesuai dengan tipologi konflik yang terjadi selama ini, sistem penanganan konflik yang dikembangkan lebih mengarah kepada penanganan yang bersifat militeristik/represif. Beberapa contoh konflik horizontal yang bersifat masif dan pola penyelesaiannya menggunakan cara-cara militeristik/represif tersebut antara lain: konflik sosial di Sambas, konflik sosial di Maluku Utara, konflik sosial Ambon, konflik sosial Poso, konflik sosial Papua Barat, dan konflik sosial Papua. Penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut belum dilaksanakan secara komprehensif dan integratif, termasuk peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden.

Berbagai upaya terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Mengacu kepada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, maka kerangka regulasi yang ada juga mencakup tiga strategi, yaitu pertama, kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda. Ketiga, adalah peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca

konflik yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum, serta kegiatan-kegiatan recovery, reintegrasi dan rehabilitasi.

Pengkajian ini ingin menggali lebih dalam mengenai berbagai alternatif yang mungkin dilakukan dalam menangani konflik sosial di Indonesia sebagaimana dicontohkan di atas. Pentingnya kajian ini didasarkan pada setidaknya 3 (tiga) argumentasi, yaitu argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antarkelompok dan golongan. Kedua, tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan budaya dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, tanggungjawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Bebas dari rasa takut, jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil dan sejahtera.

Selanjutnya, argumentasi Sosiologis Pengkajian tentang Penanganan Konflik adalah, Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragam suku bangsa, agama dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan,

ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kemiskinan berpotensi untuk melahirkan konflik-konflik di tengah masyarakat. Kedua, Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri pada satu sisi, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh-pengaruh asing, sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik. Ketiga, Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan, maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman dan menciptakan rasa takut masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerusakan pranata sosial, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian, perasaan permusuhan), melebarnya jarak segregasi antar para pihak yang berkonflik, sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Kelima, Penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Keenam, Dalam mengatasi dan menangani berbagai konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum menemukan suatu format kebijakan penanganan konflik yang menyeluruh (comprehensive), integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai.

Sedangkan argumentasi yuridis dari ini adalah karena peraturan perundang-undangan terkait penanganan konflik sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, bersifat sektoral, reaktif, serta tidak memadai

menjadi landasan hukum penanganan konflik yang komprehensif dan intetratif.

Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik identik dengan penghentian konflik. Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu: kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam masyarakat majemuk seperti Bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan damai (*peace*). Misalnya ; *Dalihan Natolu* (Tapanuli), *Rumah Betang* (Kalimantan Tengah), *Menyama Braya* (Bali), *Saling Jot dan Saling Pelarangan* (NTB), *Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro* (Jawa Timur), *Alon-alon Asal Kelakon* (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), *Basusun Sirih* (Melayu/Sumatera), dan *Peradilan Adat Clan Selupu Lebong* (Bengkulu).

Penghentian konflik dilakukan melalui:²⁸

- a. penghentian kekerasan fisik;
- b. penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. bantuan pengerahan sumber daya TNI.

Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan di bawah koordinasi POLRI²⁹, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. POLRI dalam menghentikan kekerasan fisik

²⁸ Pasal 12

²⁹ Pasal 13 ayat (1) dan (2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:³⁰

- a. pemisahan para pihak atau kelompok yang berkonflik;
- b. melakukan tindakan penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
- c. pelucutan senjata tajam dan peralatan berbahaya lainnya; dan
- d. melakukan tindakan pengamanan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

POLRI dalam menghentikan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang untuk:³¹

- a. menetapkan batas demarkasi wilayah antar kedua kelompok yang terlibat konflik;
- b. menetapkan zona konflik;
- c. melarang berkumpul dalam jumlah tertentu di daerah konflik;
- d. memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan/atau
- e. mendamaikan dan merekonsiliasi para pihak.

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dihentikan oleh POLRI dan tidak berjalan fungsi Pemerintahan.³²

Status Keadaan Konflik terdiri atas:³³

- a. konflik nasional;
- b. konflik provinsi; atau
- c. konflik kabupaten/kota.

Konflik nasional sebagaimana dimaksud apabila eskalasi konflik mencakup beberapa provinsi. Konflik provinsi sebagaimana dimaksud apabila eskalasi konflik mencakup

³⁰ Pasal 14

³¹ Pasal 15

³² Pasal 16

³³ Pasal 17

beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Konflik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud apabila eskalasi konflik terjadi dalam satu kabupaten/kota.

Status Keadaan Konflik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.³⁴ Dalam hal terjadi konflik dalam eskalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) presiden meminta persetujuan DPR dengan menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik nasional. DPR memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

Status Keadaan Konflik provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi.³⁵ Dalam hal terjadi konflik dalam eskalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) gubenur meminta persetujuan DPRD provinsi dengan menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik provinsi. DPRD provinsi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Status Keadaan Konflik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten / kota³⁶. Dalam hal terjadi konflik dalam eskalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) bupati/walikota meminta persetujuan DPRD Kabupaten/kota dengan menyampaikan permohonan

³⁴ Pasal 18

³⁵ Pasal 19

³⁶ Pasal 20

persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan penetapan Status Keadaan Konflik paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.³⁷

Dalam hal Status Keadaan Konflik nasional, Presiden dapat menunjuk pejabat pemerintahan sebagai pelaksana penyelesaian konflik.³⁸ Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menteri yang membidangi koordinasi di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. menteri yang membidangi koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. menteri yang membidangi urusan kesehatan;
- e. menteri yang membidangi urusan sosial;
- f. menteri yang membidangi urusan agama;
- g. Kepala POLRI;
- h. Panglima TNI;
- i. Jaksa Agung; dan
- j. Kepala daerah yang wilayahnya mengalami konflik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan para menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Status Keadaan Konflik provinsi, gubernur melaksanakan penyelesaian konflik dibantu oleh:³⁹

- a. kepala kepolisian daerah;

³⁷ Pasal 21

³⁸ Pasal 22

³⁹ Pasal 23

- b. komandan satuan TNI yang ditunjuk;
- c. kepala kejaksaan tinggi;
- d. bupati/walikota yang wilayahnya mengalami konflik; dan
- e. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.

Dalam melaksanakan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Presiden. Dalam Status Keadaan Konflik kabupaten/kota, bupati/walikota melaksanakan penyelesaian konflik dibantu oleh: ⁴⁰

- a. kepala kepolisian resort;
- b. komandan satuan TNI yang ditunjuk;
- c. kepala kejaksaan negeri;
- d. camat dan kepala desa/lurah yang wilayahnya mengalami konflik; dan
- e. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.

Dalam melaksanakan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Presiden melalui gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Presiden, gubernur, bupati/walikota dalam Status Keadaan Konflik berwenang melakukan:⁴¹

- a. pembatasan dan penutupan sementara waktu kawasan konflik;
- b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- c. penempatan orang untuk sementara waktu di luar kawasan bahaya ;
- d. pelarangan orang sementara waktu untuk memasuki atau meninggalkan kawasan konflik.

⁴⁰ Pasal 24

⁴¹ Pasal 25

Pembasmian Mental Konflik

Sebagai sebuah sistem mental, konflik merupakan sebuah upaya untuk menyingkirkan kelompok lain, sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antar kelompok itu. Dengan kata lain, terjadinya pembasmian etnis baik yang berkedok agama, ras, suku dan kebangsaan pada dasarnya adalah sebuah perang identitas untuk mempertahankan sebuah kepentingan bersama.

Seseorang atau sekelompok orang akan sangat bersifat resisten terhadap kelompok lain agar kepentingan mereka tidak diganggu. Itu sebabnya konflik mudah sekali terjadi ketika di dalam suatu komunitas itu terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan dapat disebabkan baik karena perbedaan fisik, keyakinan, ras, tingkat ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya. Konflik karena perbedaan-perbedaan inilah sebenarnya yang disebut dengan perang identitas.

Penyelesaian sebuah konflik apalagi yang dilatari multi faktor membutuhkan waktu yang cukup panjang. Diperlukan adanya usaha penyadaran kepada setiap individu bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang harus berpegang pada prinsip saling menghargai dan menghormati atas adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah anugrah yang diberikan Tuhan untuk menguji kesabaran setiap manusia. Karena tidak akan pernah ada seorangpun yang sama persis dengan diri kita. Itu sebabnya tidak ada jalan lain kecuali menerima dan menghormati perbedaan itu.

Komunikasi yang baik antar kelompok merupakan sebuah usaha untuk menghindari kesalahpahaman antar kelompok dalam suatu komunitas. Komunikasi ini merupakan proses pendidikan yang akan memberi kesadaran untuk saling menghormati adanya perbedaan. Setiap orang harus disadarkan

bahwa keindahan hanya dapat diraih dengan penggabungan perbedaan-perbedaan. Seperti halnya dalam tubuh kita, keindahan diri kita tidak akan pernah tercapai kecuali adanya perbedaan-perbedaan dari bagian tubuh kita. Demikian juga, hanya kombinasi banyak warna lah yang dapat menghasilkan keindahan dalam lukisan. Hal ini mengindikasikan jika kita ingin hidup damai, tentram, sejahtera dan indah maka kita harus berdamai dengan berbagai perbedaan itu. Karena sesungguhnya perbedaan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Perbedaan pasti akan selalu ada dalam berbagai lapisan dan juga bidang kehidupan sosial kita.

Pendidikan merupakan upaya memberikan informasi sekaligus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebabnya hanya dengan pendidikan akan wawasan kehidupan yang baik yang dapat menyelesaikan adanya konflik berkepanjangan antarsesama kelompok di belahan bumi ini. Sikap saling menghormati dan menghargai harus dikedepankan dalam memandang adanya perbedaan. Dengan demikian mental konflik dapat dikikis melalui pendidikan moral bangsa yang kita sepakati yaitu Pancasila.

Pengendalian Konflik

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik nasional, Presiden dengan persetujuan DPR dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.⁴² Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik provinsi, gubernur, dengan persetujuan DPRD provinsi dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik untuk waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik

⁴² Pasal 26

kabupaten/kota, bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh Presiden, gubernur atau bupati/walikota kepada DPR atau DPRD sesuai tingkatannya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.⁴³ DPR atau DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukannya permohonan. Dalam hal DPR atau DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan Status Keadaan Konflik diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Presiden, gubernur, bupati/ walikota mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.⁴⁴ Dalam hal penetapan status keadaan konflik dicabut, semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku.

⁴³ Pasal 27

⁴⁴ Pasal 28

BAB 10

UPAYA PEMULIHAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT

Saling Menghormati

Penghormatan terhadap keberagaman menjadi isu yang penting untuk dipahami dalam interaksi antar bangsa. Karena kegagalan memahami esensi keberagaman akan mematikan potensi konflik. Penghargaan terhadap keberagaman merupakan salah satu nilai kepribadian Bangsa Indonesia.

Keberhasilan sebuah negara atau organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin atau personelnya untuk mengelola relasi saling menghormati dan menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak lain.

Keberagaman mengacu kepada berbagai perbedaan dalam hal etnis, ras, latar belakang profesional, agama atau kepercayaan politik dan lain sebagainya. Pemahaman tentang keberagaman seperti fenomena gunung es yang hanya tampak 10 % dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan seperti warna kulit, bahasa, dialek, etnis dan lainnya. Sementara bagian terbesar yang berada di bawah sering kali diabaikan. Hal itulah yang sering memicu persoalan dalam hubungan antar individu, bangsa atau negara. Suatu negara juga akan gagal membangun perdamaian di negaranya apabila pemahaman terhadap keberagaman masih rendah.

Pengembangan sikap saling menghormati antar pihak yang berkonflik merupakan salah satu kunci penyelesaian konflik.

Berbagi Kekuasaan Sebagai Akomodasi Konflik

Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai suatu keadaan dan suatu proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi berarti adanya kenyataan suatu keseimbangan (equilibrium) hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi sehubungan dengan norma-norma sosial dan kebudayaan yang berlaku. Sebagai suatu proses, akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan (Soerjono Soekanto).

Suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan (menurut Gillin and Gillin). Atau dapat dikatakan suatu proses sosial atau interaksi guna mencapai keseimbangan sosial dalam masyarakat baik antarindividu, kelompok atau golongan guna meredakan ketegangan yang timbul akibat adanya perselisihan.

Adapun tujuan Akomodasi secara sosiologis adalah :

1. Untuk mengurangi konflik yang timbul akibat adanya perbedaan atau paham
2. Mencegah meledaknya konflik yang lebih besar
3. Meningkatkan kerjasama antar kelompok
4. Mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah.

Kompromi merupakan salah satu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutanannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Sikap untuk dapat melaksanakan compromise adalah sikap untuk bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. Contohnya: kompromi antara sejumlah partai politik untuk berbagi kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh

masing-masing.

Disamping itu ada pula Konsiliasi yaitu suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan bersama. Contohnya: pertemuan beberapa petinggi partai politik untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam mengutamakan persatuan nasional setelah ajang pilpres.



Gambar 3 Proses Konsiliasi

(sumber: <http://2enam.com/ombudsman-gelar-konsiliasi-polemik-lahan-pembangunan-pkm-rangas/>)

Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Jurdil

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk memberikan pilihan suaranya. Dalam dua kali pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 yang baru lalu, dapat disebut pemilu yang paling jurdil. Hal ini dibuktikan dengan putusan KPU, BAWASLU dan MK terhadap penentuan paslon Capres pemenang pemilu.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun

peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil inilah menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan konflik kepentingan antar elit partai dalam meraih kekuasaan.

Politik Otonomi Daerah

Berakhirnya Orde Baru Tahun 1998 diiringi oleh situasi keamanan tanah air yang tidak terkendali dengan munculnya konflik horizontal antar kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu konflik horizontal yang menarik perhatian kalangan nasional dan internasional adalah konflik yang terjadi di provinsi Kalimantan Barat, khususnya kabupaten Sambas pada

tahun 1999.⁴⁵ Konflik antar-etnis yang melibatkan orang Dayak, orang Melayu Sambas ini disebabkan oleh perselisihan akibat kesalahpahaman antara penduduk asli Sambas, penduduk asli Kalimantan dengan pendatang. Hal ini memicu sengkaret lainnya, dengan adanya eskalasi gesekan masing-masing etnis yang ingin mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada melalui arena percaturan politik.

Gery Van Klinken dalam bukunya *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (2007) mengemukakan bahwa konflik etnis di Indonesia terjadi secara paralel sebagai akibat dari transisi politik dari era otoriter menuju demokrasi. Klinken berpandangan bahwa aktor-aktor dalam politik lokal, sebagai akibat dari penerapan otonomi daerah memainkan peran yang signifikan dalam terjadinya konflik. Dalam konflik di Sambas, keputusan politik yang diambil oleh aktor-aktor politik lokal adalah pemekaran daerah berdasarkan dominasi etnis secara demografis. Pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Sambas dinilai dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Hasil penelitian Tengku Abdurrahman, mahasiswa doktoral Ilmu Politik FISIP UI yang mengkaji pembentukan daerah otonomi baru sebagai solusi penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Sambas sebagai bahan disertasinya. Ia mendeskripsikan penyebab munculnya konflik Sambas dan kelompok etnis yang terlibat serta relasi di antaranya. Selain itu, Ia ingin mendapatkan deskripsi yang utuh tentang proses pembentukan daerah otonomi baru sebagai bentuk solusi antar-etnis di Kalimantan Barat. Pisau bedah yang digunakan dalam penelitiannya antara lain teori konflik dan resolusi konflik serta konsep pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom di

⁴⁵ Disertasi, Abdurrahman, pembentukan daerah otonomi baru sebagai solusi penyelesaian konflik di Kabupaten Sambas <http://fisip.ui.ac.id/pembentukan-daerah-otonom-sebagai-solusi-konflik-antar-etnis/>

Indonesia.

Dari hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa proses pembentukan daerah otonom didukung penuh oleh aspirasi masyarakat melalui kelompok-kelompok adat dan pemerintah daerah serta melalui ekspose Bupati Kabupaten Daerah (KDH) Tingkat II Sambas tentang pemekaran wilayah KDH II Sambas. Dinyatakan pula bahwa pemekaran harus dilakukan agar konflik antar etnis dapat terhindar dan dapat dengan mudah dikendalikan.

Abdurrahman menuturkan bahwa salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik antar etnis di wilayah yang masyarakatnya terbagi atas kelompok-kelompok etnis ialah dengan melakukan pembentukan daerah otonom baru dan memberikan etnis-etnis wilayah sendiri untuk dikelola.

Demikian pula pemberian otonomi khusus untuk Papua. Pemerintah pusat saat ini telah memberikan perhatian yang lebih kepada Papua berupa pembangunan fisik infrastruktur yang cukup menggembirakan setelah 70 tahun tidak menjadi pusat perhatian Jakarta.

Bantuan Intervensi Asing

Dalam mengatasi konflik-konflik berkepanjangan yang melanda suatu negara, pemerintah setempat tidak hanya mengandalkan usaha internal atau domestik. Berbagai pihak asing, baik negara maupun organisasi internasional, juga diberi kesempatan untuk turut membantu mengatasi konflik-konflik yang ada. Hal ini sesuai dengan pandangan beberapa ahli yang beranggapan bahwa intervensi asing memiliki pengaruh kuat terhadap penyelesaian konflik di suatu negara. Terlebih lagi ketika pemerintah domestik dari negara yang terkena konflik tidak mampu mengatasi permasalahan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Menurut Doyle dan Sambanis (2006) upaya untuk mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian atau *peacebuilding* telah mengalami beberapa perkembangan paska berakhirnya Perang Dingin. Negara tidak hanya cukup mengandalkan peran domestik, melainkan juga dibutuhkan peran-peran dari luar atau bisa pula disebut sebagai intervensi asing. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin, namun penyelesaian konflik dan upaya mewujudkan perdamaian yang hanya mengandalkan usaha dari domestik akan menjadi hal yang sulit dilakukan di era saat ini. Bahkan hal tersebut justru memunculkan peluang akan terulangnya konflik di waktu-waktu mendatang. Oleh sebab itu, menyelesaikan konflik bukan lagi menjadi satu-satunya hal terpenting, melainkan juga tentang bagaimana cara memelihara kondisi damai tersebut dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seterusnya (Doyle dan Sambanis, 2006). Tidak hanya itu, upaya penting untuk mewujudkan perdamaian yaitu merubah struktur yang bermasalah untuk mencegah munculnya konflik-konflik baru. Untuk mewujudkan itu semua, negara dinilai tidak mampu bekerja secara mandiri. Bantuan pihak luar menjadi hal penting yang dibutuhkan sehingga munculnya intervensi asing dalam penanganan konflik di suatu negara dipandang sebagai hal positif yang menguntungkan.

Peran Juru Damai

Peran juru damai sering disandangkan kepada seorang tokoh nasional yang dikenal dan dapat diterima semua kalangan dan kelompok yang sedang berkonflik. Menjadi juru damai itu diawali dengan kita memiliki pikiran dan hati yang positif. Dengan demikian, kita akan tulus melihat perbedaan. Pada akhirnya pihak-pihak yang akan dan telah berkonflik akan melihat ketulusan kita dalam mendorong perdamaian di Indonesia. Dengan berpengetahuan luas dan punya ketulusan, maka juru damai tidak gampang dikalahkan dalam proses

mendamaikan sebuah perbedaan. Selain itu, harus memiliki keberanian.

Indonesia yang multikultur akan terus memerlukan pengikat untuk menjaga persatuan dan perdamaian bangsa. Pengikat itu adalah kepemimpinan yang kuat dan kemampuan para pemimpin untuk menguatkan toleransi antar kelompok dan agama di Indonesia.

Berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat mendorong pemerintah -dalam hal ini Kementerian Sosial- untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga pelopor perdamaian di seluruh tanah air.⁴⁶ Tujuannya agar dapat mendeteksi segala potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Sebagaimana disampaikan Harry Hikmat selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos bahwa adanya bencana sosial di masyarakat memiliki kompleksitas yang harus ditangani secara serius. Sebab, terdapat berbagai kepentingan dan tujuan yang jika tidak dimediasi akan menimbulkan konflik.

Untuk menjadi orang yang dapat menyelesaikan konflik maka pelopor perdamaian dituntut memiliki pemikiran yang terbuka, tidak hanya berpikir dari satu sisi tetapi juga berpikir dari sisi kelompok yang dihadapinya.

Keberadaan tenaga pelopor perdamaian masih kurang mengingat luasnya wilayah kerja yang mereka hadapi. Kemensos sendiri mencatat hingga saat ini baru sebanyak 1.454 anggota pelopor perdamaian. Jika di Indonesia ada sekitar 7.000 kecamatan maka idealnya harus tersedia 21.000 orang pelopor perdamaian.

⁴⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20181017/15/849901/redam-konflik-sosial-dengan-pelopor-perdamaian>

BAB 11

PRAKARSA PENGEMBANGAN PERDAMAIAN

Sebuah negara tentunya memimpikan suatu sistem, baik sistem pemerintahan maupun sistem sosial, yang tentunya akan memberikan suatu feedback antarkedua sistem tersebut. Sehingga tentunya dalam penerapan sistem yang diciptakan harusnya bisa membuat salah satu sistem saling berinteraksi. Sistem, khususnya sistem yang dibentuk oleh pemerintah, harus bisa menjadikan sistem sosial yang ada di bawahnya atau yang sedang berjalan di dalamnya bisa mematuhi dan mengikuti semua sistem pemerintahan yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga disini dapat terbentuk suatu interaksi yang akan saling menterkaitkan antarsistem tersebut. Sehingga jika dalam suatu negara pada kedua sistem tersebut terbentuk suatu interaksi maka negara tersebut akan mencapai suatu titik puncak persatuan yang biasa disebut dengan integrasi nasional / integrasi bangsa.

Para pahlawan pembangun bangsa ini telah membuat suatu sistem besar, sistem pemerintahan yang kompleks dimana sistem tersebut akan senantiasa bisa digunakan, diterapkan, dipelajari, dikaji, dimultifungsikan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun dengan syarat pengguna tersebut harus bisa memetik intisari yang terdapat dalam kandungan sistem tersebut. Sistem tersebut adalah Pancasila, yang telah didesain oleh para leluhur kita secara mendetail, mendasar, dan benar – benar endemik sesuai kebutuhan dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Tidaklah berlebihan jika Pancasila adalah salah satu alat yang dapat dijadikan bukan hanya oleh sistem pemerintahan,

namun juga dalam sistem sosial, sebagai salah satu alat untuk kembali mempersatukan negara ini sesuai dengan apa yang dicita – citakan oleh para leluhur kita. Pancasila dapat kita jadikan sebagai tameng yang akan melindungi citra bangsa ini sebagai bangsa yang berbhinneka namun dapat bersatu padu.

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran negara –yang diwakili oleh simbol seorang pemimpin negara- dalam mewujudkan integrasi bangsa sangat menentukan dan hal itu diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Beberapa prakarsa pengembangan perdamaian diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

Pelucutan Senjata/ Demiliterisasi

Konflik di suatu wilayah kadang disebabkan oleh peran militer yang terlalu besar keterlibatannya dalam kehidupan sosial. Termasuk di zaman Orba dulu yang menerapkan politik Dwi Fungsi ABRI dala mengontrol kehidupan sosial. Demiliterisasi sebagai upaya dalam memprakarsai perdamaian dan penanganan konflik menjadi salah satu opsi yang diambil para pimpinan negara. Demiliterisasi adalah pengurangan tentara, senjata, atau kendaraan militer suatu negara ke batas minimum yang telah disepakati. Demiliterisasi biasanya merupakan hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri perang atau konflik besar.

Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan dengan akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Bentuk-bentuk akomodasi dalam militer misalnya Gencatan senjata,

yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu, misalnya untuk melakukan perawatan bagi korban yang luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.

Reformasi Konstitusi

Konflik sering muncul akibat dari ketidakadilan yang terstruktur dan sistematis. Melibatkan penguasa oligarki dalam suatu negara untuk membangun kesejahteraan kelompok elit dan mengorbankan hak-hak rakyat.

Para wakil rakyat yang korup yang dikooptasi penguasa tiran menjadi alat dalam melahirkan undang-undang dan peraturan yang memihak kelompok elit dan eksklusif. Dari sinilah sumber yang memicu konflik sosial menjadi bom waktu.

Langkah reformasi konstitusi dalam penyelesaian konflik diperlukan dalam penyelesaian konflik.

Keterpaduan visi, misi, strategi, dan pendekatan pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, khususnya pemerintah di semua tingkatan menjadi prasyarat utama dalam pencegahan konflik sosial di Indonesia. Pendekatan sektoral yang terjadi selama ini, dalam penanganan konflik sosial, perlu dievaluasi kembali.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Meskipun begitu, implementasi UU PKS belum sepenuhnya berjalan efektif, mengingat berbagai regulasi operasional masih pada tahap penyusunan oleh beberapa kementerian terkait.

Sementara di sisi yang lain, berbagai kejadian konflik sosial masih terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat,

walaupun berbagai kejadian konflik sosial yang terjadi ini relative berskala kecil dan tidak massif, namun hal ini tentu saja akan mengganggu proses jalannya pembangunan dan ketentraman hidup masyarakat pada umumnya, jika tidak segera ditangani dengan baik dan dicari akar persoalannya.

Bantuan Ekonomi

Kondisi politik dan keamanan lokal yang belum pulih mengakibatkan pula belum pulihnya kondisi sosial ekonomi rakyat, seperti aset ekonomi berupa lahan-lahan pertanian yang terlantar di wilayah konflik. Kendala dalam mengatasi masalah sosial adalah kuatnya prasangka sosial dan stereotaip dari satu pihak kepada yang lain. Pada sisi lain, kemampuan pemerintah daerah setempat sangat terbatas untuk mengatasi masalah sosial dan sekali gus mendanai perbaikan berbagai sarana dan prasarana ekonomi rakyat dan kemudahan umum lainnya. Begitu pula dana pemulihan bagi korban kerusakan hanya berlangsung untuk beberapa waktu.

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk membangun kembali berbagai kemudahan umum, terutama pendidikan merupakan kendala yang dialami oleh daerah konflik, di samping terbatasnya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya akibat kerusakan. Selain itu, banyak tenaga kependidikan yang enggan untuk kembali mengajar di daerah konflik karena khawatir kerusakan terjadi lagi.

Guna melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat

penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi.

Adapun pemulihan pascakonflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya. Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud meliputi: a. Rekonsiliasi; b. Rehabilitasi; dan c. Rekonstruksi. Sementara sumber pendanaan penanganan konflik berasal dari: APBN, APBD, dan/atau dari donasi masyarakat.

Dengan demikian maka salah satu prakarsa perdamaian adalah dengan memberikan bantuan ekonomi pascakonflik kepada warga pascakonflik. Adapun bantuan luar negeri dan dari NGO harus tetap dalam pengawasan pemerintah agar dapat mencegah penyalahgunaan bantuan dana asing pascakonflik.

Pengembangan Rasa Saling Percaya

Rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan Tanah Air merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik tersebut perlu untuk ditangani dan diselesaikan segera.

Hambatan dalam membangun rasa saling percaya dan penciptaan harmonisasi antara lain:

1. *Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi.* Kesenjangan multidimensi memiliki potensi untuk

semakin memecah-belah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara tidak sehat. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antarmasyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal dari terjadinya disintegrasi nasional.

2. *Rekonsiliasi nasional yang masih belum efektif.* Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, bangsa Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi nasional yang lebih adil dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut.
3. *Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum efektif.* Kurangnya koordinasi dan rendahnya saling percaya antar lembaga pemerintah serta antar pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik.
4. *Kebijakan komunikasi dan informasi nasional belum optimal.* Kebijakan yang lebih memperbesar akses masyarakat luas terhadap proses perumusan kebijakan publik, sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antar kelompok-kelompok masyarakat akan sangat menentukan peningkatan saling pengertian antar berbagai kelompok yang ada.

Sasaran dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat adalah:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik;
2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian

persoalan sosial kemasyarakatan.

Dukungan Internasional (Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase)

Peran dukungan internasional khususnya PBB sebagai lembaga dunia penjaga perdamaian sangat penting dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Apalagi setelah ditunjuknya Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB tahun ini. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia telah menorehkan berbagai capaian terkait upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

Bagi Indonesia, konsep perdamaian lebih luas dari sekedar ketiadaan perang, namun juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

Dengan peran besar tersebut diharapkan dukungan internasional dalam menciptakan perdamaian di tengah konflik kawasan dapat lebih efektif.

Dalam literatur tentang pengelolaan konflik, dikenal beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang sudah banyak dikenal diantaranya mediasi. Mediasi berarti melibatkan pihak luar atau intervensi negara asing ke dalam penyelesaian konflik. Mediasi berasal dari kata Latin *mediatio*, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan mediator/pihak ketiga. Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat; keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan konflik/perselisihan.

Sedangkan Arbitrasi berasal dari kata Latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan

konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antara dua negara dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbiter, atau instansi internasional lain seperti PBB.

Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter/ wasit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anonim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Yang Baru*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Cox, Michael, 2001. "International History", dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The*

Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press.

Crockatt, Richard, 2001. "The End of the Cold War", dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.

Fukuyama, F., 1989. "The End of History?", dalam *The National Interest*, No 16, Summer 1989.

Goldstein, Joshua S., 2005. *International Relations*, Pearson/Longman.

Huntington, S., 1993. "The Clash of Civilizations?", dalam *Foreign Affairs* 72(3): 22-49.

Luttwak, E., 1990. "From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce", dalam *The National Interest*.

Ogashiwa, Yoko, 2002, "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.

Peters, S., 1999, "The 'West' against the 'Rest': Geopolitics after the end of the cold war", dalam *Geopolitics* 4(3): 29-46

Hidayat, Imam, 2002, *Teori-teori Politik*, PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hoffer, Eric , 1998, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Haris, Syamsuddin, 2005, *Mengelola Potensi Konflik Pilkada*, Kompas tanggal 10 Mei 2005

Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: LKIS.

Ngadisah, 2003, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik*, Yogyakarta: Pustaka Raja.

Plano, Jack C, dkk, 1994, *Kamus Analisa Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Pruitt, Dean G., Jeffry Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik*, DIKTI, Jakarta
- SN, Kartikasari, (Ed), 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta.
- SENDI, 2001, *Jurnal Media Watch dan Civic Education*, Edisi 4-5.
- Sulistyaningsih, Tri, dan Hijri, Yana Syafriyana, 2006, *Pemahaman Masyarakat Multikulturalisme dalam Pengelolaan Konflik Sosial dan Politik (Studi pada Masyarakat Multi Etnik di Kota Malang)*, *Jurnal Publica FISIP UMM*, Edisi VII.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Trijono, Lambang (Ed), 2004, *The Making of Ethnic & Religious Conclit in Southeast Asia, Cases and Resolutions*, Yogyakarta: CSPS Books.
- Urbaningrum, Anas, *Ranjau-Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, 1998, Rajawali Press, Jakarta.
- Yuliyanto, Muchamad, 2005, *Urgensi Manajemen Konflik di Tengah Perubahan*, *Jurnal Publica FISIP UMM*, Edisi V.

DAFTAR INDEX

kolaborator, 23

komunitas, 22

BIODATA PENULIS

Penulis lahir di